PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN LUWU

(Studi Kasus: Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli)

Oleh

SOFYAN THAMRIN

NIM 46 20 102 009

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN LUWU

(Studi Kasus: Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli)

Oleh

SOFYAN THAMRIN

NIM 46 20 102 009

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu (Studi Kasus Kawasan Kumuh Desa Cimpu)
Nama Mahasiswa	: Sofyan Thamrin
Nim	: 4620102009
Program Studi	: Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ir. Rudi Latief , M.Si.	**Dr. Syafri, ST., M.Si**

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana	Ketua Program Studi PWK
Prof. Dr. Ir. H. A. Muhibuddin, M.Si NIDN : 00-0508-6301	**Dr. Ir. Syafri, M.Si** NIDN : 09-050768-04

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022

Tesis Atas Nama : Sofyan Thamrin

NIM : 4620102009

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ir. Rudi Latief , M.Si. (.....)

(Pembimbing 1)

Sekertaris : Dr. Syafri, S.T., M.Si. (.....)

(Pembimbing 2)

Anggota Penguji : 1. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si. (.....)

2. Dr. Ir. H. Syahriar Tato, M.S. (.....)

Makassar, 19 Agustus 2022

Direktur

Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S.

NIDN. 00-050863-01

PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: SOFYAN THAMRIN
NIM	: 4620102009
Program Studi	: Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan Pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan Judul *"Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu (Studi Kasus Kawasan Kumuh Desa Cimpu)"* adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan bahan yang izinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah tertulis dengan lengkap pada daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpanan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 19 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan

SOFYAN THAMRIN

ABSTRAK

Sofyan Thamrin, 2022 **"Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu (Studi Kasus: Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli)"**. Dibimbing oleh **Dr. Ir. Rudi Latief, M. Si** dan **Dr. Ir. Syafri, ST., M.Si**.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis tingkat kekumuhan, mengetahui faktor-faktor determinan dan merumuskan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian mix method. Untuk menganalisis tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu menggunakan analisis skoring baseline, untuk mengetahui faktor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan digunakan analisis Regresi Linear Berganda dan untuk mengetahui pengaruh tingkat kekumuhan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan kegiatan survei atau observasi lapangan secara fisik atau wawancara terhadap responden dan indikator kumuh pada lokasi penelitian. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan data institusional.

Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang. Untuk mengetahui faktor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu adalah kondisi bangunan gedung, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, proteksi kebakaran dan status kepemilikan lahan. Konsep makro penanganan kawasan kumuh di kawasan Cimpu adalah: pencegahan, pemugaran, dan peremajaan kawasan.

Kata kunci: Permukiman, Kumuh, Pencegahan, Peningkatan Kualitas

ABSTRACT

Sofyan Thamrin, 2022 "Community Participation in the Prevention and Improvement of the Quality of Slums in Luwu Regency (Case Study: Cimpu Slum Area, Suli District)". Supervised by Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si and Dr. Ir. Syafri, ST., M.Sc.

The purpose of this study is to analyze the level of slums, determine the determinant factors and formulate strategies to prevent and improve the quality of slum settlements in the Cimpu area, Suli district, Luwu regency.

This type of research is a mixed method research. To analyze the level of slums in the Cimpu area, Suli sub-district, Luwu district, a baseline scoring analysis was used, to determine the determinant factors causing the level of slums, multiple linear regression analysis was used and to determine the effect of the slum level. This study uses primary data and secondary data. Primary data were obtained by conducting physical surveys or field observations or interviewing respondents and slum indicators at the research location. As for the secondary data obtained by institutional data.

The main conclusion in this study is that based on the results of the baseline scoring analysis, it shows that the slum level in the Cimpu Slum Area, Suli District, Luwu Regency is in the moderate slum category. To find out the determinant factors that cause the level of slums in the Cimpu Slum Area are building conditions, drinking water supply conditions, environmental drainage conditions, wastewater treatment conditions, solid waste treatment conditions, fire protection and land ownership status. The macro concept of handling slum areas in the Cimpu area is: prevention, restoration and rejuvenation of the area.

Keywords: Settlements, Slums, Prevention, Quality Improvement

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah reformer panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Agung, Dzat Yang Maha Suci, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **"PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN LUWU "(Studi Kasus: Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli)"**.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan pada **PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**, dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran selama ini.

Kami menyadari bahwa betapa berat dan banyaknya halangan yang datang dalam proses penyelesaian penelitian ini, namun Syukur Alhamdulillah dengan bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak, hambatan yang ada dapat dilalui dengan cepat. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Keluarga tercinta kedua orang tua Ayahanda **M. THAMRIN (Alm)** dan Ibunda **Hj. NURLELA SABILANI (Almh)** yang telah banyak berkorban semasa hidup kami, serta Istri tercinta **Hj. ERNA MADJID, ST, M.Si** dan buah hati yang tersayang **FIDELA SHAZIA ASSYFA SOFYAN**, terima kasih atas supportnya kalian berdua adalah spirit baru bagi saya untuk melangkah kedepan.
2. Bapak **Dr. Ir. Syafri, M. Si** selaku **DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS BOSOWA** atas dukungan dan bantuannya selama kami mengikuti perkuliahan.
3. Bapak **Dr. Ir. Rudi Latief, M. Si** dan Bapak **Dr. Ir. Syafri, M. Si** selaku **Pembimbing** kami dalam proses penelitian ini, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

4. Terkhusus buat adinda **Nur Reski, ST** yang selama ini banyak membantu segala keperluan mulai dari proses perkuliahan sampai pada proses penelitian ini, terima kasih atas semua bantuannya, kelak akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik.
5. Para Stakeholder yang terkait yang telah banyak memberikan bantuan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian ini.
6. Pejabat struktural, staf serta tim kreatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu atas bantuannya dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Terkhusus kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa **PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR ANGKATAN 2020,** terima kasih atas semuanya, semoga persahabatan dan perjuangan belum sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa hasil akhir dari penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, kami mengharapkan kritikan dan saran yang positif sebagai masukan dalam penyempurnaan tesis ini, sehingga akan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, **INSYA ALLAH, AMIN.**

Wassalamu Alaikum, Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2022

Sofyan Thamrin

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PENERIMAAN
HALAMAN PERNYATAAN
HALAMAN ABSTRAK
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
1. Bidang Akademik 12
2. Pemerintah 12
3. Masyarakat 12
E. Ruang Lingkup Penelitian 13
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Perumahan dan Permukiman 15
B. Permukiman Kumuh 19
1. Pengertian Dan Karakteristik Permukiman Kumuh .. 19
2. Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh 23
3. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 33
4. Tipologi Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh 62
5. Konsep Penangan Permukiman Kumuh 63
6. Dasar Hukum RP2KPKPK 64

BAB III. METODE PENELITIAN..... 67
A. Lokasi Penelitian..... 67
B. Waktu Penelitian..... 67
C. Data dan Cara Perolehannya..... 67
D. Teknik Pengumpulan Data..... 70
E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling..... 70
F. Variabel Penelitian..... 72
G. Teknik Analisis Data 73
H. Devinisi Operasional..... 80
I. Kerangka Berfikir 81
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 83
A. Gambaran Umum 83
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu..... 83
a. Letak Geografis dan Administrasi..... 83
b. Topografi..... 88
c. Kemiringan Lereng..... 92
d. Jenis Tanah dan Batuan 93
e. Kependudukan..... 96
f. Penggunaan Lahan..... 97
2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan..... 99
a. Aspek fisik Dasar..... 99
1.) Letak Geografis dan Administrasi..... 99
2.) Topografi..... 100
3.) Hidrologi..... 101
4.) Klimatologi 101
5.) Geologi 102
b. Demografi 102
1.) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 102
3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 103
a. Profil & Karakteristis Kawasan Penelitian 105

1.) Bangunan Gedung 105
2.) Kondisi Jalan Lingkungan 105
3.) Kondisi Penyediaan Air Bersih 106
4.) Kondisi Drainase Lingkungan..... 107
5.) Kondisi Pengolahan Air Limbah 107
6.) Pengolahan Persampahan..... 108
7.) Sosial Ekonomi 108
B. Analisis Tingkat Kekumuhan 109
C. Analisis Faktor Determinan Penyebab Tigkat Kekumuhan di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 118
D. Analisis Strategi Pencegahan dan Penangan Permukiman 129
BAB V. PENUTUP 140
A. Kesimpulan..... 140
B. Saran..... 141
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 63
Tabel 3.1. Data Baseline Umum Kawasan 74
Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kab Luwu 85
Tabel 4.2. Topografi dan dan Kelerengan di Kab Luwu 88
Tabel 4.3. Luas daerah dan persentase ketinggian wilayah 92
Tabel 4.4. Jenis tanah dan luas penyebarannya 94
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 96
Tabel 4.6. Luas setiap jenis penggunaan lahan di Kab. Luwu 99
Tabel 4.7. Luas setiap wilayah menurut Kelurahan/Desa 100
Tabel 4.8. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kec. Suli 103
Tabel 4.9. Hasil perhitungan parameter tingkat kekumuhan di kawasan Kumuh Cimpu 109
Tabel 4.10 Kriteria dan indicator penentuan tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu 111
Tabel 4.11. Hasil penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan kawasan kumuh cimpu 117
Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas 120
Tabel 4.13. Hasil uji rehabilitas 121
Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 123
Tabel 4.15. Hasil Uji Simultan (Uji F) 124
Tabel 4.16. Hasil Uji Parsial (Uji) 125
Tabel 4.17. Konsep dan Strategi Kawasan Cimpu 134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Pikir 83
Gambar 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab.Luwu 86
Gambar 4.2. Peta Administrasi Kabupaten Luwu 87
Gambar 4.3. Morfologi Kab.Luwu dan sekitarnya 90
Gambar 4.4. Peta Topografi Kabupaten Luwu..... 90
Gambar 4.5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Luwu 95
Gambar 4.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 97
Gambar 4.7. Peta Adminitrasi Kecamatan Suli 104
Gambar 4.8. Peta Lokasi Penelitian 105
Gambar 4.9. Profil Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu 133

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota bagi negara-negara yang sedang membangun berlangsung relatif pesat karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomi (Suud & Navitas, 2015). Salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang semakin deras diakibatkan ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di desa. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Secara sosiologis permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis, dengan gambaran dan kesan secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interpretasi umum bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah pemukim yang tinggal atau berada didalam suatu lingkungan yang rendah kualitasnya

dengan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal manusia untuk hidup dengan layak.

Kawasan permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telah tentang kawasan permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur (Putro, 2011).

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, kumuh dianalogikan sebagai permukiman dengan kondisi hunian rumah buruk

dan kurangnya pelayanan infrastruktur permukiman dengan kondisi ekonomi pemukiman yang mencerminkan kurang mampu atau miskin. Penggunaan ruang tersebut kerap kali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan / bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni.

Pesatnya perkembangan permukiman perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk maupun urbanisasi yang mengakibatkan timbulnya permukiman kumuh (Solehati, 2017). Hal ini memicu peningkatan pelayanan dasar perkotaan terhadap kebutuhan hunian, dalam penyediaan kawasan perumahan dan permukiman hal yang menjadi permasalahan di perkotaan yaitu penyediaan lahan dan harga lahan, dan mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut timbul pada saat tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan perumahan, selain itu Pemerintah juga tidak memiliki kemampuan finansial Permasalahan tersebut timbul pada saat tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan perumahan, selain itu Pemerintah juga tidak memiliki kemampuan finansial.

Tren pembangunan wilayah di indonesia, seperti negara berkembang lainnya, ditandai dengan pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini berdampak pada kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas juga akan meningkat.

Harus diakui bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi perkotaan dan pedesaan, ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas, belum merata ke semua lapisan masyarakat, dan ditandai dengan semakin terkonsentrasinya perumahan. Lingkungan perumahan seringkali tidak disertai dengan penambahan sarana dan prasarana. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah harus merespon kebutuhan sarana dan prasarana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kasus yang terjadi di Indonesia, penurunan kualitas lingkungan perumahan pedesaan dan perkotaan cenderung terjadi di kawasan

padat penduduk, seperti kawasan kumuh perkotaan. Pemanfaatan lahan yang optimal, bentuk bangunan yang semrawut, infrastruktur dan fasilitas lingkungan yang tidak memadai menjadi tanda-tanda penurunan tersebut. Berbagai upaya diperlukan untuk model pendekatan holistik, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang telah dilakukan antara lain: bedah rumah, bantuan teknis, rumah model, perbaikan desa termasuk infrastruktur jalan dan kanal, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas toilet, kotak sampah dan penyediaan air bersih. Rencana tersebut didukung oleh konsep Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 100 – 0 – 100, yang bertujuan untuk menangani permukiman seperti air bersih, permukiman kumuh dan sanitasi.

Pentingnya penanganan masalah lingkungan, salah satunya penanganan permukiman kumuh, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Peraturan UU No 1 Tahun 2010 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan untuk (1) Memenuhi keinginan masyarakat rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka pengingkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Masalah permukiman kumuh tetap menjadi masalah utama yang dihadapi di wilayah perkotaan. Melonjaknya urbanisasi yang

berlebihan akibat akumulasi sumber mata pencaharian di wilayah kota ternyata menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat pedesaan (khususnya golongan MBR) untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal di tanah ilegal yang berada di dekat pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan kumuh. Di sisi lain, standar pelayanan minimal (SPM) kota sudah tidak terpenuhi lagi di beberapa kawasan permukiman yang berada di atas lahan lepas, yang pada akhirnya juga berdampak pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan kota. Tinggal di kawasan permukiman kumuh perkotaan tidak selalu menjadi pilihan namun menjadi suatu keharusan bagi MBR yang harus menerima begitu saja kondisi lingkungan perumahan yang tidak layak dan berada di bawah standar pelayanan minimal yang meliputi rendahnya kualitas air minum, drainase, limbah, sampah dan berbagai masalah yang meliputi kepadatan dan ketidak teraturan. Rumah yang selain berimplikasi pada meningkatnya bahaya kebakaran serta pengaruh sosial serta tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah utama pembangunan kota yang cukup menjadi polemik, karena nyatanya upaya pengelolaan kadang-kadang telah diselesaikan dalam persentase langsung terhadap perbaikan terus-menerus kawasan kumuh dan munculnya kawasan kumuh baru-baru ini. Khususnya,

dampak permukiman kumuh juga dapat menciptakan paradigma buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan gambaran yang mengerikan tentang ketidak berdayaan dan ketidak mampuan pemerintah dalam mengatur keberadaan pelayanan dan penghidupan penduduknya. Namun, dalam bidang tatanan sosial sosial budaya, masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh pada umumnya adalah korporasi yang berpenghasilan rendah secara ekonomi, yang seringkali menjadi penyebab terjadinya degradasi kawasan dan penyakit dalam berbagai tatanan sosial.

Pencegahan dan pembinaan kawasan permukiman kumuh telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya, penanggulangan permukiman kumuh telah benar-benar difokuskan dalam RPJMN 2015-2019, dimana sasaran prinsipnya adalah terwujudnya kota bebas kumuh pada tahun 2019. Tata cara penanganan permukiman kumuh telah dimulai pada tahun 2015 dan sasaran 0 persen harus dilakukan pada 2019, sehingga waktu penobatan hanya 4 (empat) tahun dengan beragam masalah yang belum terdeteksi secara mutlak. Langkah pertama dalam mengejar target kota metropolitan bebas kumuh 2019 sebenarnya telah dimulai dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Bina Cipta Karya karena pada tahun 2014 dengan menyusun peta jalan pengelolaan permukiman kumuh dan

pemutakhiran permukiman kumuh. Fakta yang telah dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian/usaha terkait dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan penangan permukiman yang erat kaitannya dengan sisi pengadaan perumahan untuk masyarakat ekonomi lemah yang selalu timbul dalam kota-kota berkembang. Dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kasawan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasaran yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya.

4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
   a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian air.
   b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
   c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang tewujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informasi atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

Berdasarkan salah satu ciri diatas, disebabkan bahwa permukiman kumuh memiliki ciri “kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang

mampu atau miskin”. Kondisi seperti ini juga yang terjadi di Kawasan Kumuh Cimpu.

Kecamatan Suli, merupakan salah satu titik kawasan kumuh di Kabupaten Luwu. Kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Suli sebenarnya sudah terbentuk sejak lama, namun karena kurangnya perhatian dari pemerintah, permukiman kumuh di Kecamatan Suli tidak selalu terselesaikan. Salah satu lokasi prioritas permukiman kumuh yang perlu ditinjau di Kecamatan Suli adalah Kawasan Cimpu adapun Faktor atau kendala permukiman kumuh di Kawasan Cimpu adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memadai, sebagian besar merupakan MBR dan tidak memiliki akses untuk memenuhi hunian layak, secara keseluruan bangunan tidak memiliki IMB, konstruksi bangunan sebagian besar terbuat dari bahan yang mudah terbakar (kayu) dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni. Dengan begitu, permukiman yang berada pada Kawasan Cimpu di kategorikan kawasan kumuh sedang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, permukiman kumuh di Kecamatan Suli sebagai lokasi penelitian dengan judul **“ Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli).** Oleh

karena itu perlu diadakan suatu kajian atau penelitian permukiman Kawasan Kumuh Cimpu dengan kajian permukiman kumuh yang dilihat dari tingkat kekumuhan permukiman serta faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya permukiman kumuh, serta strategi pencegahan dan penangan permukiman kumuh dalam memperbaiki permukiman tersebut sesuai dengan penataan ruang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanan tingkat kekumuhan permukiman di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ?
2. Faktor-faktor determinan apa yang menyebabkan tingkat kekumuhan permukiman di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ?
3. Bagaimana strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor determinan apa yang menyebabkan tingkat kekumuhan permukiman di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
3. Untuk merumuskan dan mengetahui strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Akademik

Terkait dengan bidang akademik perencanaan wilayah dan kota, penelitian ini bermanfaat untuk semakin memperdalam pemahaman mengenai faktor apa yang mempengaruhi tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dan meneruskan penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat lebih maksimal.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi dalam upaya pengendalian terhadap permukiman kumuh di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai strategi pengendalian permukiman kumuh di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan tujuan penelitian untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang mendalam dan akurat serta dengan melihat keterbatasan waktu yang ada maka dilakukan pembatasan lingkup penelitian. Ruang lingkup dari pembahasan ini adalah analisis tingkat kekumuhan yang meliputi :

1. Penelitian ini di lakukan di Kawasan Kumuh Cimpu
2. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kawasan Kumuh Cimpu dengan menggunakan form baseline kumuh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategis penanganan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Cimpu.
4. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di dasari dengan mengikuti alur pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar Belakang yang menjadi motivasi di lakukannya penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Lingkup Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang rujukan teori dan materi yang berhubungan/ memperkuat pengambilan keputusan/ interpretasi dan identifikasi terhadap data dan analisis yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, populasi, sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, pendekatan analisis, teknik analisis data, variabel penelitian, dan kerangka pikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum wilayah yang menjelaskan gambaran kondisi wilayah penelitian, karakteristik wilayah, pengumpulan data dari hasil observasi dan kuisioner dan membahas tentang analisis dari hasil pengumpulan data, dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda, serta merumuskan strategi pencegahan dan penanganan permukiman.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perumahan dan Permukiman

Menurut UU No 4 Tahun 1992 Pasal 3, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman juga dapat didefinisikan sebagai kawasan yang didominasikan oleh lingkungan yang dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana lingkungan dan tempat kerja yang mampu menyediakan atau memberikan pelayanan yang baik serta kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan sehingga fungsinya dapat bekerja secara efisien.

Permukiman didalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu :

a. Bagian dari lingkungan tempat tinggal di luar kawasan yang diselimuti, baik di dalam bentuk kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang bersifat lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pemukiman dan tempat kegiatan yang menjadi pedoman mata pencharian dan penghidupan.
b. Kawasan yang didominasi kawasan hunian dengan fungsi utama sebagai fungsi tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana,

sarana lingkungan dan tempar kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan agar ciri permukiman dapat efisien dan efektif.

c. Suatu daerah atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat tinggal.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Menurut Yudohusodo (1991), permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun kebanjiran.

Menurut Budiharjo (1997), permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-

cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penhidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Menurut Suparlan (2002), dalam Syaiful. A (2002) bahwa permukiman dapat digolongkan sebagai permukiman kumuh karena, pertama, kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman. Kedua, jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau busuk. Keempat, fasilitas umum kurang atau tidak memadai. Kelima, kondisi fisik hunian atau rumah pada umumnya mengungkapkan kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik.

Permukiman menurut Vinch dan Trewartha dalam Bintarto (1977), menyatakan permukiman tempat kediaman penduduk adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup

bersama, dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka. Permukiman merupakan suatu lingkungan hidup yang berada diluar kawasan lindung baik yang berupa perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal serta tempat kegiatan usaha dan kerja yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Hal inilah yang menjadikan pada tingkat primer permukiman tempat tinggal. Pada tingkat lebih lanjut, permukiman dapat diberi fungsi atau misi sebagai penyangga kawasan fungsional serta kawasan produktif lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdcsaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Permukiman sebagai suatu wadah atau suatu wujud fisik budaya saling mempengaruhi dengan isinya, dan bertautan dengan lingkungan alami sebagai tempatnya. Ada 2 aspek penting mengenai isi dan lingkungan alami yang perlu dipahami dari permukiman, yaitu pertama, isi meliputi dinamika perubahan demografis, sosial ekonomi dan budaya. Kedua, lingkungan alami meliputi sumberdaya alam dan fisik spasial (geografi fisik) mengalami perubahan dan perkembangan, karena terjadinya perubahan fisiksosio ekonomi masyarakat. (Hamidah, Rijanta, Setiawan, & Rifai, 2014).

B. Permukiman Kumuh

1. Pengertian dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Secara umum kawasan kumuh dicirikan oleh kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kepadatan hunian yang sangat tinggi, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas perumahan yang sangat rendah, serta kondisi infrastruktur dan infrastruktur yang memadai seperti air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, dan lain-lain. Fasilitas pendidikan, ruang terbuka, fasilitas pelayanan kesehatan, konsusmsi dan sebagainya. Selain itu, ditandai dengan tingkat pendapatan penduduk yang rendah, tingkat privasi keluarga

yang rendah. Rendahnya kohesi masyarakat akibat berbagai norma sosial budaya yang dianut.

Permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan penduduk miskin perkotaan yang padat, terletak di kedua sisi jalan atau gang-gangnya kotor dan merupakan bagian dari seluruh kota atau biasa disebut juga dengan kawasan tercemar oleh suprlan. Namun dalam rincian ini, permukiman kumuh sebagai tempat di mana anggota masyarakat, yang sebagain sebar berpenghasilan rendah, membentuk permukiman dengan kondisi minim. (Raharjo, 2005)

Charter Adam (1984) menamakan permukiman kumuh sebagai kampung kumuh yang menampilkan konstruksi ilegal di atas lahan ilegal. Menurut E.E Bergel (1970), Permukiman Kumuh tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi sosial. Soemadi (1990) menyatakan bahwa permukiman kumuh merupakan bagian dari kota yang kotor, dengan bangunan-bangunan di bawah standar dan sarana sanitasi dan pengolahan sampah yang dihuni masyarakat miskin dengan sarana air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layal huni karena tidak teraturnya bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,

daan kondisi rumah serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi kebutuhan.

Karakteristik Permukiman Kumuh menurut Johan Silas :

a. Kondisi rumah di kawasan harus berada di bawah standar umum 6 m2/orang. Sementara itu, fasilitas pusat perkotaan secara tidak langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun, karena letaknya yang dekat dengan permukiman saat ini, fasilitas lingkungan tidak sulit untuk didapatkan.
b. Secara fisik, permukiman ini memberikan manfaat utama, terutama yang dekat dengan tempat tinggal (possibillity fee) dan harga tempat tinggal juga terjangkau (prinsip leterjangkuan) baik untuk dibeli atau disewa. Keistimewaan perumahan seperti halnya pekerjaan dan harga murah adalah kesempatan untuk mendapatkannya atau aksesibilitas yang berlebihan. Hampir setiao orang tanpa syarat bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di sana.

Menurut UU No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Yudohusodo (1991), permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak

tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun kebanjiran.

Menurut Budiharjo (1997), permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penhidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Menurut Suparlan (2002), dalam Syaiful. A (2002) bahwa permukiman dapat digolongkan sebagai permukiman kumuh karena, pertama, kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman. Kedua, jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau busuk. Keempat, fasilitas umum kurang atau tidak

memadai. Kelima, kondisi fisik hunian atau rumah pada umumnya mengungkapkan kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik.

2. Faktor-faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh

Menurut Hariyanto (2010) faktor penyebab tumbuhnya Kawasan kumuh (slum) terbagi atas 2, yaitu faktor bersifat langsung dan faktor bersifat tidak langsung. Faktor bersifat langsung meliputi kondisi rumah, kondisi jalan, kondisi drainase, air bersih, air limbah, persampahan, dan status lahan. Sedangkan faktor bersifat tidak langsung yaitu faktor yang tidak berhubungan dengan kekumuhan, Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial. Menurut Constantinos A. Doxiadis disebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman (development of human settlement) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- *Growth of density* (Pertambahan jumlah penduduk)

  Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

- *Urbanization* (Urbanisasi)

Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kaeasan pusat kota (down town). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Menurut Danisworo dalam Khomarudin (1997: 83-112) bahwa kita harus akui pula bahwa tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi.

Pada dasarnya permukiman kumuh mencakup berbagai faktor penting, khususnya tanah/lahan, rumah/perumahan, jaringan, sarana dan prasarana dasar, yang dapat dirangkai menjadi perangkat sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suasana lingkungan permukiman kumuh itu sendiri senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang menjadi penyebab maraknya permukiman adalah sebagai berikut:

a. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk

Subtansi urbanisasi adalah cara modernisasi daerah pedesaan menjadi kota sebagai akibat dari tingkat urbanisasi di suatu lokasi atau negera bagian. Konsekuensinya adalah mungkin ada pergerakan manusia (dengan aktivitas

ekonominya) secara individu atau kelompok yang berasal dari desan menuju kota atau daerah hinterland lainnya. Hal ini ingin dibedakan dari persepsi pertumbuhan kota, yang digambarkan sebagai harga kenaikan penduduk perkotaan, masing-masing dalam skala yang tidak memihak dan secara nasional bersama-sama.

Derajat tingkat urbanisasi, biasanya dalam konteks populasi, adalah bagian dari populasi perkotaan terhadap populasi di seluruh negeri. Namum persoalan urbanisasi tidak harus ditafsirkan sendiri dalam konteks kependudukan, justru harus menutupi skala perbaikan dan kondisi sosial dan keungan masyarakat, bahkan lebih jauh mencakup unsur budaya dan politik. Pada hakekatnya, dalam hal kepentingan ekonomi, persepsi urbanisasi adalah subtansi dari pergeseran atau informasi perubahan corak sosial-ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa (Tommy Firman, 1996).

Rumusan beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi terjadinya proses keurbanan, antara lain :

1) Ketimpangan tingkat pertumuhan ekonomi antar desa perkotaan
2) Peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah perkotaan dengen pedesaan

3) Perubahan pola minat kerja Pertanian ke industri, terutama untuk penduduk usia kerja pedesaan
4) Teknologi dan infrastruktur transportasi yang lebih maju untuk infrastruktur transportasi, meningkatkan mobilitas penduduk, permanen atau shuttle
5) Ada fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, terutama pendidikan, kesehatan, pariwisata dan aspek sosial lainnya.

Proses urbanisasi merupakan fenomena umum, pengalaman yang di alami negara berkembang. Proses pengembangan ini relatif pesat. Karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis dan non ekonomis. Kondisi daerah pedesaan yang miskin adalah pendorong yang kuat dengan meningkatnya urbanisasi ke kota-kota besar.

Untuk kota yang mulai padat, pertumbuhan penduduk tahunan jauh meleihi lapangan kerja yang tersedia di perbatasannya, sehingga dirasa menambah bobot permasalahan kota tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk kaum urban memaksa mereka untuk menempati daerah pinggiran (slum area) untuk membentuk lingkungan permukiman kumuh.

Migrasi sebenarnya telah berkembang dan berbagai ahli telah banyak membahas tentang teori migrasi tersebut dan sekaligus melakukan penelitian tentang migrasi.

Lee dalam Lisna Yoeliani P (1966) mendekati migrasi dengan formula yang lebih terarah. faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas kelompok sebagai berikut :

- Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran.
- Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran (destination).
- Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors).
- Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran.

Faktor-faktor yang ada di tempat asal migran maupun di tempat tujuan migran dapat terbentuk faktor positif maupun faktor negatif. Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk faktor yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan tidak berpindah. Di daerah tempat tujuan migran fakor tersebut dapat berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Tanah yang tidak subur, penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran merupakan pendorong untuk pindah. Namun rasa kekeluargaan yang erat, lingkungan sosial yang kompak merupakan faktor yang menahan agar tidak pindah. Upah yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik di daerah tempat tujuan migran

merupakan faktor penarik untuk datang kesana namun ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran tersebut.

Keberadaan penduduk migran di permukiman kumuh yang menempati lahan milik pemerintah atau milik publik, dapat dikategorikan sebagai hunian ilegal atau lazim disebut hunian liar *(squatter)*. Hal ini jelas telah menimbulkan konflik antara penghuni dengan instansi yang bertanggung jawab atas lahan yang ditempatinya, Meskipun mereka tinggal pada permukiman liar, namun mereka juga membentuk lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), bahkan sebagian dapat menikmati penerangan listrik, ada pula yang punya telepon rumah, dan tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka juga telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kondisi yang demikian, jelas akan mempersulit bagi Pemkot Luwu maupun pemilik lahan untuk membebaskan permukiman demikian.

b. Faktor Lahan di Perkotaan

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah menyebabkan berbagai persoalan serius diantaranya adalah permasalahan perumahan. Permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidak seimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di

perkotaan. Di samping itu sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci untuk menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini hanya mampu tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang tidak layak.

Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum tidak mampu ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekenisme pasar tanpa mempertimbangkan secara serius pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi kaum miskin diperkotaan. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan permukiman kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus mengalami penurunan kualitas dan rentan masalah sosial lainnya.

c. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar

Secara umum karakteristik Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum tidak mampu ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekenisme pasar tanpa mempertimbangkan secara serius pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi kaum miskin diperkotaan. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan permukiman kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus

mengalami penurunan kualitas dan rentan masalah sosial lainnya.

Rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana dasar ini pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat juga terbatas pula. Bahkan juga disebabkan pula oleh terbatasnya peran berbagai lembaga maupun individu atau pihak di luar pemerintah, baik secara profesional atau sukarela dalam peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar.

d. Faktor Sosial Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar.

Di sisi lain, pada kenyataannya penghuni lingkungan permukiman kumuh yang sebagian besar berpenghasilan rendah itu memiliki potensi berupa tenaga kerja kota yang memberikan konstribusi sangat signifikan terhadap kegiatan perekonomian suatu kota. aktivitas ekonomi di sektor informal

terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan produksi melalui sektor informal. Dengan demikian tingkat pendapatan penghuni lingkungan permukiman kumuh yang rendah ini merupakan permasalahan yang serius keberlangsungan produtivitas suatu kota. Permasalahan sosial ekonomi merupakan salah satu pendorong meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota, dari daerah pinggiran ke pusat kegiatan ekonomi sehingga menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh baru.

Ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya permukiman kumuh di daerah perkotaan maupun di daerah pesisir. Keterbatasan penghasilan akibat dari semakin sulitnya mencari pekerjaan didaerah perkotaan membuat masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri.

Ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, Masyarakat berusaha dengan orientasi memenuhi kebutuhan hidup. Dan ketika mereka berhadapan dengan keterbatasan pekerjaan formal yang jelas strukturnya, mereka menciptakan pekerjaan-pekerjaan informal yang memberi peluang untuk melangsungkan kehidupan. Tercukupinya kebutuhan hidup

adalah konsep sederhana tentang kebahagiaan yang dimiliki oleh kaum miskin. Namun, dalam usaha mereka tersebut, mereka berhadapan dengan roda pembangunan ciptaan penguasa yang tidak berpihak pada mereka.

Persoalan ketidak mampuan ekonomi merupakan imbas urbanisasi, lonjakan pengangguran, serta tingginya tuntutan dan biaya hidup yang memaksa manusia kota kreatif untuk berusaha di bidang ekonomi. Berdasarkan survei BAPPENAS pada 2002, kuantitas pekerja di sektor informal selalu paralel dengan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja serta angka pengangguran. Semakin tinggi angka Pemutusan Hubungan Kerja dan tingkat pengangguran, berarti jumlah Pekerja pada sektor informal juga akan bertambah. Urbanisasi juga menyumbang pertambahan pekerja pada sektor informal lantaran para pendatang dari perdesaan umumnya tak memiliki keterampilan yang memadai di sektor formal. (Jawa Pos, 2006)

e. Faktor Aksesibilitas

Secara umum, salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah terbatasnya akses penduduk miskin kepada kapital komunitas (community capital). Kapital komunitas ini meliputi kapital terbangun, individu dan sosial serta lingkungan alam.

Kapital terbangun meliputi informasi, jalan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, ruang terbuka, perumahan, pasar, bangunan-bangunan pelayanan publik, sekolah dan sebagianya. Kapital individu, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan kemampuan dan keterampilan. Kapital sosial, antara lain meliputi koneksitas dalam suatu komunitas-cara manusia berinteraksi dan berhubungan dengan lainnya. Dalam skala lebih luas, sekelompok manusia membentuk organisasi, baik organisasi sukarela, bisnis melalui perusahaan maupun pemerintah dan sebagainya, termasuk berbagai sistem sosial yang ada, termasuk kebijakan pembangunan kota.

Sedangkan kapital lingkungan alam meliputi sumber daya alam, pelayanan ekosistem dan estetika alam. Sumber daya alam adalah apa saja yang diambil dari alam sebagai bagian dari bahan dasar yang dipakai untuk proses produksi. Pelayanan ekosistem antara lain berupa kemampuan tanah untuk budidaya tanaman yang bisa memberikan bahan makanan, bahan untuk pakaian dan sebagainya.

3. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut buku panduan RP2KPKPK merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh

dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

a. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mancakup:

(1) Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(2) Tingkat Kepadatan Bangunan Yang tinggi yang tidak sesuai dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang.

Tingkat kapadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesaui dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan :

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

(3) Ketidaksesuaian Terhadap Peryaratan Teknis Bangunan Gedung.

Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:

- Pengendalian dampak lingkungan;
- Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
- Keselamatan bangunan gedung;
- Kesehatan bangunan gedung;
- Kenyamanan bangunan gedung; dan
- Kemudahan bangunan gedung.

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

b. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup :

1) Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan atau Permukiman

   Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

2) Kuliatas Permukiman Jalan Lingkungan Buruk

   Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

c. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup :

1) Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

   Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

2) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar yang Berlaku

   Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat

dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

d. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

1) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan

   Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

2) Ketidaktersediaan Drainase

   Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

3) Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan

   Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

4) Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- Pemeliharaan rutin; dan/atau
- Pemeliharaan berkala.

5) Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

e. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang Berlaku

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

2) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

- Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau
- Tidak tersediannya sistem pengelolahan limbah setempat atau terpusat.

f. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup :

1) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
   - Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
   - tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
   - gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan

- tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

2) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- pewadahan dan pemilahan domestik;
- pengumpulan lingkungan;
- pengangkutan lingkungan; dan
- pengolahan lingkungan

3) Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahantidak dilaksanakan baik berupa:

- Pemeliharaan rutin; dan/atau
- Pemeliharaan berkala.

g. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:

1) Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

   Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

   - pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
   - jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi;
   - sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran; dan/atau
   - data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

2) Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- kendaraan pemadam kebakaran;
- mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
- peralatan pendukung lainnya.

h. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disesuaikan dengan Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Kondisi Bangunan Gedung (rumah dan sarana perumahan dan/atau permukiman)

a) Keteraturan Bangunan

Komponen keteraturan bangunan meliputi:

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Minimal GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang

lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).

2. Tinggi Bangunan

   Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

3. Jarak Bebas Antarbangunan

   Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaanpermukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

4. Tampilan Bangunan

   Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan arsitektur yang berlaku, keindahan dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

5. Penataan Bangunan

   a. pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu.

b. pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu.

c. pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling.

6. Identitas Lingkungan

a. karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik bangunan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenal suatu lingkungan/bangunan, sehingga pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang dikunjunginya.

b. penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas atau penamaan suatu bangunan sehingga pengguna dapat mengenali bangunan yang menjadi tujuannya.

c. tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh aktivitas informal sebagai pendukung dari aktivitas formal yang diwadahi dalam ruang/bangunan, untuk menghidupkan interaksi sosial dan para pemakainya.

7. Orientasi Lingkungan
   a. tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk menjelaskan berbagai informasi/ petunjuk mengenai tempat tersebut, sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap lingkungannya.
   b. tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi baik menuju maupun dari bangunan atau pun area tujuannya.
8. Wajah Jalan
   a. penampang jalan dan bangunan
   b. perabot jalan
   c. jalur dan ruang bagi pejalan kaki
   d. elemen papan reklame

b) Tingkat Kepadatan Bangunan
   1. KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
   2. KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

c) Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Komponen persyaratan teknis bangunan meliputi

1. PengendalianDampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya di luar bangunan rumah tinggal tunggal dan deret. Elemen pengendalian dampak lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkugan (UKL/UPL).

   a. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

   b. UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

2. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang

dibangun dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki perizinan.

3. Persyaratan Keselamatan
   a. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
   b. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), sistem proteksi pasif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan

instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.

c. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan

4. Persyaratan Kesehatan

a. sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.

b. pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.

c. sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik (untuk sarana medik), persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).

5. Persyaratan Kenyamanan

a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari

dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

b. kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

c. kenyamanan pandangan merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.

d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.

6. Persyaratan Kemudahan

a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

b. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung yaitu sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).

2) Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Komponen jalan lingkungan meliputi:

1. Cakupan Pelayanan

a. Perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah

1) Jalan lingkungan sekunder bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

2) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

b. Perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan dalam skala kawasan

1) Jalan Lingkungan I, merupakan penghubung antara pusat perumahan dengan pusat lingkungan I, atau pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan I dan akses menuju jalan Lokal Sekunder III.

2) Jalan Lingkungan II, merupakan penghubung antara pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan II, atau pusat lingkungan II dengan pusat lingkungan II dan

akses menuju jalan lingkungan I yang lebih tinggi tingkat hirarkinya.

2. Kualitas Permukiman Jalan, mengacu dan menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan
   a. Kualitas jalan aspal
      - Baik : IRI ≤ 4
      - Sedang : IRI > 4 dan IRI ≤ 8
   b. Kualitas jalan penmac (penetrasi makdam)
      - Baik : IRI ≤ 8
      - Sedang : IRI > 8 dan IRI ≤ 10
   c. Jalan tanah/diluar perkerasan
      - Baik : IRI ≤ 10
      - Sedang : IRI > 10 dan IRI ≤ 12

3) Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Komponen penyediaan air minum meliputi:

1. Akses aman air minum

   Syarat kesehatan air minum sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

   a. Persyaratan fisika: sifat fisik air seperti bau, warna, kandungan zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu
   b. Persyaratan mikrobiologis: kandungan bakteri dalam air yaitu bakteri E-Coli dan bakteri koliform,

c. Persyaratan kimiawi: kandungan mineral dalam air seperti arsen, fluorida, sianida, khlorin, alumunium, mangan dan mineral lainnya

2. Kebutuhan air minum

Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) maupun Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

a. SPAM

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/ sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Komponen SPAM meliputi :

1) Unit air baku dengan kapasitas Rencana 130% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen:

- mata air
- air tanah
- air permukaan (sungai, danau, laut)
- air hujan

• pipa transmisi air baku dari sumber air baku ke Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)

2) Unit produksi dengan kapasitas rencana 120% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen

• Bangunan Penangkap Mata Air

• Bangunan Pengambilan Air Baku dari Air Tanah (Sumur) • Bangunan Saringan Pasir Lambat

• Instalasi Pengolahan Air Minum

• Pipa transmisi air minum dari IPA ke reservoir.

3) Unit distribusi dengan kapasitas rencana 115% - 300% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen

• Reservoir (penampungan air sementara sebelum didistribusikan)

• Pipa distribusi dari reservoir ke unit pelayanan

4) Unit pelayanan dengan komponen

• sambungan rumah

• hidran umum

• hidran kebakaran

b. SPAM BJP

SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan

terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. SPAM BJP meliputi:

1) Sumur dangkal dan/atau Sumur Dalam
2) Penampungan Air Hujan (PAH)
3) Perlindungan Mata Air (PMA)
4) Saringan Rumah Tangga (Sarut)
5) Destilator Surya Atap Kaca
6) IPA sederhana
7) Terminal Air (mobil tangki / tangki air)

4) Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

Penyediaan jaringan drainase adalah untuk mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang disebut genangan adalah terendamnya suatu kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun). Komponen Drainase Lingkungan meliputi:

1. Sistem Drainase yang terbentuk
   a. Sistem drainase utama adalah jaringan saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapnya yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat. pengelolaan/pengendalian banjir merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota

b. Sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial

2. Sarana Drainase

Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut.

a. Gorong-gorong
b. Bangunan Pertemuan Air
c. Bangunan Terjunan Air
d. Siphon
e. Street Inlet
f. Pompa
g. Pintu Air

3. Prasarana Drainase

Prasarana Drainase adaalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

a. Sumur Resapan
b. Kolam Tandon/kolam retensi

4. Konstruksi Drainase
   a. Saluran pasangan batu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas, dan mempunyai kemiringan yang curam.
   b. Saluran beton: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai topografi, yang terlalu miring atau terlalu datar, serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.
   c. Saluran dengan perkuatan kayu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyaai tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) dan selalu terjadi pergeseran (tanah bergerak).

5) Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Komponen pengelolaan air limbah meliputi:

1. Sistem pengelolaan air limbah
   a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) adalah sistem pengelolaan air limbah sistem secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
   b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) adalah sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air Air limbah limbah setempat
2. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah
   a. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpusat

1) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah
   - Kloset leher angsa dan kamar mandi
   - MCK Umum
2) Unit Pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah
   - Sambungan Rumah
   - Lubang Inspeksi
3) Unit Pengumpulan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah
   - Pipa retikulasi
   - Pipa induk
   - Bangunan Pelengkap
4) Unit Pengolahan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah, baik IPAL Komunal ataupun IPAL Kota
   - Fasilitas Utama IPAL
   - Fasilitas Pendukung IPAL
   - Zona Penyangga
5) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah
   - Sarana pembuangan efluen
   - Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan

b. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah setempat

1) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah

• Kloset leher angsa dan kamar mandi

• MCK Umum

2) Unit Pengolahan Setempat menjadi tanggung jawab pemilik rumah

• Cubluk

• Tangki septik dengan sistem resapan

• Biofilter

•Unit pengolahan air limbah fabrikasi

3) Unit Pengangkutan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

• Truk tinja

• Motor roda tiga pengangkut tinja

4) Unit Pengolahan Lumpur Tinja menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

• Fasilitas Utama IPLT

• Fasilitas Pendukung IPLT

• Zona Penyangga

5) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

• Sarana pembuangan efluen

• Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan

6) Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan. Komponen dari pengelolaan persampahan meliputi:

1. Sistem pengolahan sampah yang saling terintegrasi

a. Pemilihan

Sistem pemilahan adalah kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: • sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun • serta limbah bahan berbahaya dan beracun

• sampah yang mudah terurai

• sampah yang dapat digunakan kembali

• sampah yang dapat didaur ulang

• sampah lainnya

b. Pengumpulan

Sistem pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

c. Pengangkutan

Sistem pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

d. Pengelolaan

Sistem pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

e. Pemrosesan Akhir

Sistem pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2. Prasarana dan sarana pengelolahan sampah

a. Sarana Pemilihan

1) Kantong Sampah
2) Bak Sampah
3) Kontainer sampah

b. Sarana dan Prasarana Pengumpulan

1) Gerobak Sampah
2) Motor Sampah
3) Mobil Bak Sampah
4) Perahu / Sampan Sampah
5) Tempat Penampungan Sementara (TPS)

c. Sarana Pengangkutan

1) Dump Truck
2) Armroll Truck
3) Compactor Truck

4) Trailer Truck

d. Perasarana Pengolahan

1) Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (TPS 3R)

2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

3) Stasiun Peralihan Antara (SPA) jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 25 km dari pusat permukiman.

e. Prasarana Pemrosesan Akhir, yaitu TPA dengan sistem Sanitary Landfill, Controlled Landfill, dan TPA dengan menggukan teknologi ramah lingkungan.

7) Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Komponen Proteksi Kebakaran meliputi:

1. Prasaran Proteksi Kebakaran

a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.

c. Sarana Komunikasi yang terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran.

d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak di dalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses.

2. Sarana Proteksi Kebakaran

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

b. Mobil pompa.

c. Mobil tangga sesuai kebutuhan

d. Peralatan pendukung lainnya.

4. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari:

a. di atas air;

b. di tepi air;

c. di dataran rendah;

d. di perbukitan; dan

e. di daerah rawan bencana.

Tabel 2.1. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Tipologi	Lokasi
1	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng >10% dan <40%
5	Permukiman kumuh di daerah rawan bencana	Permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan

5. Konsep Penangan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan

permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Pencegahan, yang terdiri atas:**
   a. Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   b. Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. **Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:**
   a. Pemugaran: perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak.
   b. Peremajaan: mewujudkan permukiman yang lebih baik dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan masyarakat.
   c. Pemukiman kembali: Relokasi atau pemindahan masyarakat dari lokasi yangtidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau termasuk dalam kawasan rawan bencana.

6. **Dasar Hukum RP2KPKPK**

1. **Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sisten pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

2. **Permen PUPR No.2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

   a. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

      Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kukumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

b. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

1) Di atas air
2) Di tepi air
3) Di dataran rendah
4) Di perbukitan
5) Di daerah rawan bencana

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau wilayah survey yang dilakukan berlokasi di Permukiman Kawasan Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Pemilihan lokasi survey dikarenakan Kawasan Kumuh Cimpu merupakan Salah satu kawasan Kumuh Prioritas dengan tingkat pertimbangan lain tinggi di Kabupaten Luwu.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Pelaksanaan berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung April 2022 sampai dengan Juli 2022.

C. Data dan Cara Perolehannya

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan kegiatan survei atau observasi lapangan secara fisik atau wawancara terhadap responden dan indikator kumuh pada lokasi penelitian. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan data institusional.

a) Pengambilan Data primer

Merupakan suatu proses pengambilan data secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi untuk mengetahui faktor atau kondisi aktual di wilayah studi. Survei data primer tersebut dilakukan dengan :

Observasi, berupa pengamatan yang langsung dilakukan di wilayah studi. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui fenomena visual yang ada, meliputi pemanfaatan ruang wilayah pesisir, aktivitas penduduk serta penyimpan pemanfaatan ruang yang terjadi. Teknik pendataan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah :

(1) Foto

Model visual berupa foto ini diperlukan untuk memperkuat fakta yang ada mengenai karakteristik kawasan kumuh Cimpu.

(2) Peta Citra Satelit

Peta citra satelit diperlukan untuk menggambarkan kawasan kumuh Cimpu.

(3) Form Pengamatan Obyek

Form tersebut merupakan panduan saat melakukan pengamatan, sehingga tidak ada obyek yang terlewat. Hal-hal yang penting dapat dicatat dalam form tersebut sebagai catatan lapangan.

(4) Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawabannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup di mana dalam kuesioner in, peneliti sudah menyediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih.

(5) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan di tanyakan kepada responden.

b) Pengambilan Data Sekunder

Untuk data sekunder penulis mencoba mendapatkan data melalui survei institusional dan studi pustaka.

(1) Survei Institusional

Terkait dengan survei institusional, penulis melakukan kunjungan untuk memperoleh data ke instansi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan peneliti, adapun instansi yang dituju antara lain Bappeda (Kota dan Provinsi), BPS, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, Balai Prasarana Wilayah Sulawesi Selatan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat.

(2) Studi Literatur

Studi literatur atau studi pustaka yang didapatkan melalui buku-buku terkait, jurnal, artikel-artikel ataupun penelusuran melalui internet, sehingga peneliti memperoleh bahasan yang lebih luas.

D. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

   Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sekaligus membandingkan atau mencocokkan data dari instansi terkait dengan data yang sebenarnya di lapangan.

2. Wawancara

   Hal ini dilakukan dengan maksud mendengarkan tanggapan ataupun informasi-informasi penting tentang daerah atau wilayah survey seperti Aspek Vitalisasi Ekonomi dan Komitmen pemerintah.

E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan, produk, bahkan dokumen. Jadi, populasi bukan hanya berupa manusia (Etta, 2010).

   Dalam penelitian ini, jumlah populasi diketahui secara pasti jumlahnya *(finite population),* yaitu penelitian menggunakan

populasi unit hunian pada Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu, dengan jumlah populasi unit hunian sebanyak 825 unit bangunan.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka peniliti dapat mengambil sampel yang diambil dari populasi. Apa yang di pelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili).

Oleh karena populasi dari obyek penelitian cukup maka sampel ini di tentukan dengan menggunakan rumus yang di kemukakan Fred N.Kerlinger (1998) Sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persentasi kelonggaran ketidak telitian (presisi) karena kesalahan pengambalian sampel yang masih ditoleransi atau diinginkan

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel minimal yang harus di peroleh untuk penelitian berjumlah 825 dan dibulatkan menjadi 90 responden dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{825}{1 + 825(0,1)^2}$$

$$n = 89.189$$

$$= 90$$

Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini di lakukan dengan teknik *Purposive Sampling* atau metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dan menggunakan teknik acak sederhana *(Simple Random Sampling),* dimana memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk di pilih menjadi sampel. Namun berdasarkan metode pengambilan sampel itu, yang akan di teliti adalah faktor-faktor berpengaruh dan yang mempunyai keterkaitan dengan karakteristik pola ruang permukiman, sehingga sampel memiliki kriteria tertentu.

F. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2002:2) "Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati". Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka yang menjadi fokus variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kumuh (Y)
2. Kondisi Bangunan Gedung (X_1)
3. Kondisi Jalan Lingkungan (X_2)
4. Kondisi Penyediaan Air Minum (X_3)
5. Kondisi Drainase Lingkungan (X_4)
6. Kondisi Pengelolaan Air Limbah (X_5)

7. Kondisi Pengelolaan Persampahan (X_6)
8. Kondisi Proteksi Kebarakan (X_7)
9. Status Kepemilikan Lahan (X_8)

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Untuk menjawab rumusan masalah pertama dipergunakan skoring berdasarkan kriteria PERMEN PUPR NO.2/PRT/M/2016. Skoring ini adalah proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi berdasarkan menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 3.1 Data Baseline Umum Kawasan

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	$\frac{Jumlah\ bangunan\ tidak\ teratur\ (unit)}{Jumlah\ bangunan\ keseluruhan\ (unit)} x100\%$	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	$\frac{Jumlah\ bangunan\ dengan\ kepadatan\ tidak\ sesuai\ ketentuan\ (unit)}{Jumlah\ bangunan\ keseluruhan\ (unit)} x100\%$	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
				51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3
				25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	$\frac{Jumlah\ bangunan\ tidak\ sesuai\ teknis\ (unit)}{Jumlah\ bangunan\ keseluruhan\ (unit)} x100\%$	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
2.	Kondisi Jalan Bangunan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	$\frac{Jumlah\ kawasan\ yang\ tidak\ terlayani\ jalan\ (ha)}{Luas\ kawasan\ keseluruhan\ (ha)} x100\%$	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
		b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	$\frac{Panjang\ jalan\ lingkungan\ yang\ rusak\ (m)}{Luas\ kawasan\ keseluruhan\ (ha)} x100\%$	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidaktersediaan akses aman air minum	$\frac{Jumlah\ KK\ yang\ tidak\ terakses\ air\ minum\ berkualitas}{Jumlah\ KK\ Keseluruhan} x100\%$	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	$\frac{Jumlah\ KK\ yang\ tidak\ terpenuhi\ air\ minum\ secara\ kuantitas}{Jumlah\ KK\ Keseluruhan} x100\%$	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	$\frac{Luas\ kawasan\ yang\ terkena\ genangan\ (ha)}{Luas\ kawasan\ keseluruhan\ (ha)} x100\%$	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5
				51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
				25% - 50%area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1
		b. Ketidaktersediaan drainase	$\frac{Luas\ kawasan\ yang\ tidak\ terlayani\ sistem\ drainase\ (ha)}{Luas\ kawasan\ keseluruhan\ (ha)} x100\%$	76% - 100% area tidak tersediadrainase lingkungan	5
				51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1
		c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Makro	$\frac{Panjang\ drainase\ tidak\ terhubung\ ke\ sistem\ makro\ (m)}{Panjang\ drainase\ lingkungan\ keseluruhan\ (m)} x100\%$	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
				51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
				25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
		d. Tidak terpeliharanya drainase	$\frac{Panjang\ drainase\ tidak\ terpelihara\ (m)}{Panjang\ drainase\ lingkungan\ keseluruhan\ (m)} x100$	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5
				51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3
				25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1
		e. Kualitas konstruksi drainase	$\frac{Panjang\ drainase\ dengan\ kualitas\ buruk\ (m)}{Panjang\ drainase\ lingkungan\ keseluruhan\ (m)} x100$	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
				25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1
5.	Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	$\frac{Luas\ kawasan\ dengan\ sistem\ air\ limbah\ tidak\ sesuai\ standar\ teknis\ (ha)}{Luas\ kawasan\ kumuh\ (ha)} x100$	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	$\frac{Luas\ kawasan\ dengan\ sarpras\ air\ limbah\ tidak\ sesuai\ standar\ teknis\ (ha)}{Luas\ kawasan\ kumuh\ (ha)} x100$	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1
6.	Kondisi pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	$\frac{Luas\ kawasan\ dengan\ sarpras\ pengelolaan\ sampah\ tidak\ sesuai\ standar\ teknis\ (ha)}{Luas\ kawasan\ kumuh\ (ha)} x100$	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} x100$	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5
				51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
				25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sistem pengolahan sampah tidak terpelihara (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} x100$	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5
				51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3
				25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	$\frac{\text{Luas kawasan tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} x100$	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memilikiprasarana proteksi kebakaran	1
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	$\frac{\text{Luas kawasan tidak tersedia sarana proteksi kebakaran (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} x100$	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

2) Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu faktor-faktor determinan apa yang menyebabkan tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terkait. Adapun Rumus Regresi Linear Berganda :

$$Y = a + b1X1+b2X2+\ldots+bnXn$$

Y = variabel terikat

a = konstanta

b1,b2 = koefisien regresi

X1, X2 = variabel bebas

3) Untuk menjawab rumusan masalah ketiga digunakan Analisis Kebijakan dengan langkah sebagai berikut :

- Mengelompokkan kawasan permukiman yang sesuai dan tidak sesuai dengan Rencan Tata Ruang (Kumuh/Slum dan Squatter).
- Membuat daftar kebutuhan penanganan baik itu dalam konteks pencegahan maupun permukiman kumuh ilegal.
- Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan permukiman berlandaskan kondisi, potensi, dan permasalahan kota/perkotaan dan kawasan.

- Merumuskan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatkan kualitas permukiman kumuh dalam bentuk matriks.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Adapun diantaranya sebagai berikut:

a. Tingkat Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP).
b. Kondisi Bangunan Gedung, dalam hal ini dimaksud ialah kondisi bangunan bermukim masyarakat telah memenuhi standar kelayakan.
c. Kondisi Jalan Lingkungan, dalam hal ini dimaksud jalan yang menjadi prasarana pendukung masyarakat telah memenuhi standar lebar jalan atau ketersedian jalan di Kawasan Cimpu.
d. Kondisi Penyediaan Air Minum, dalam hal ini dimaksud ialah masyarakat setempat telah memperoleh ketersedian air minum yang cukup atau telah terpenuhi.
e. Kondisi Drainase Lingkungan, dalam hal ini ialah untuk mengairkan aliran pembuangan limbah ataupun air hujan yang turun di suatu wilayah terpenuhi sesuai standar.

f. Kondisi Penyediaan Air Limbah, dalam hal ini ialah pengelolaan limbah rumah tangga telah dikelola dengan baik mengarah ke pembuangan yang sesuai standar teknis.

g. Kondisi Pengelolaan Persampahan, dalam hal ini ialah pengelolaan sampah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

h. Kondisi Proteksi Kebakaran, dalam hal ini ialah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan.

i. Status Kepemilikan Lahan, dalam hal ini adalah status kepemilikan lahan rumah yang didiami oleh anggota keluarga merupakan tanah milik sendiri, sewa, ataupun tanah pemerintah.

I. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah suatu alur pikir peneliti mulai dari awal dalam menemukan judul penelitian hingga dilakukannya penelitian tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Kerangka Pikir

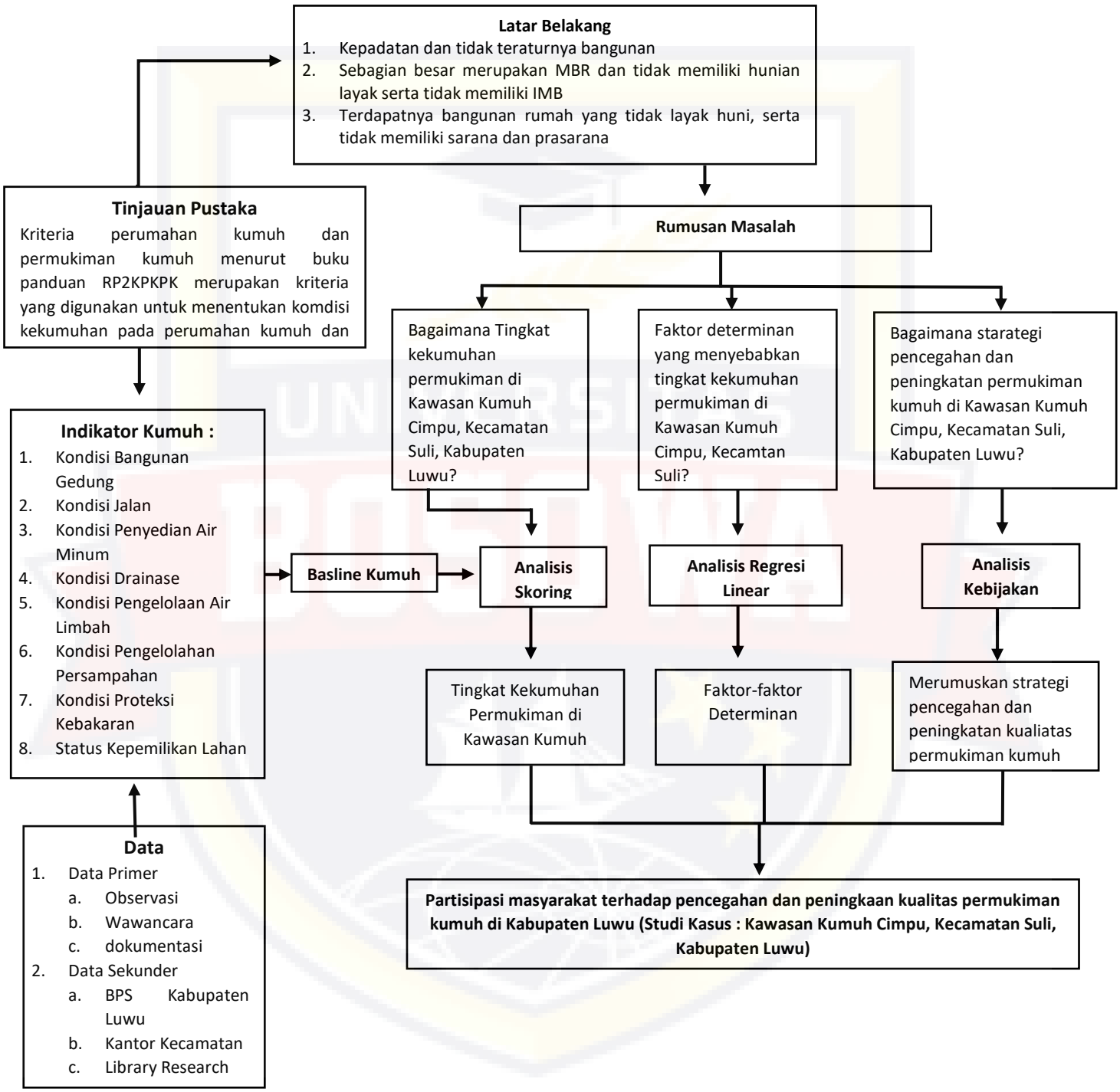

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

a. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Luwu terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yaitu Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang, Kecamatan Bassesangtempe Utara, Kecamatan Bassesangtempe, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Bajo, Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Bua, Kecamatan Bupon, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Belopa, Kecamatan Suli dan Kecamatan Larompong. Pusat pemerintahan Kabupaten Luwu terletak di Kecamatan Belopa, yang sekaligus sebagai ibukota kabupaten. Sementara itu pusat-pusat pemerintahan tingkat kelurahan, masing-masing terletak di ibukota kelurahan.

Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara 2°34’45”-3°30’30” Lintang Selatan dan 120°21’15”-121°43’11” Bujur Timur, dimana posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300

km dari Kota Makassar. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Luwu berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo;
- Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Kurang Lebih 2.909,08 km^2 (Luwu dalam angka 2021). Secara administratif Kabupaten Luwu terbagi atas 22 Kecamatan yang terdiri dari 227 desa dan kelurahan .Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Luwu yakni 338,71 km^2 atau sekitar 11,64% dari luas wilayah Kabupaten Luwu. Menyusuk kemudian kecamatan bassesangtempe dan walenrang barat dengan luas masing masing seitar 275,77 km^2 dan 253,04 km^2 atau 9,48 persen dan 8,7 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah kecamatan belopa utara dengan luas kurang lebih 30, 63 km^2 atau hanya sekitar 1,05 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN (%)
1	Larompong	245,04	8,42
2	Larompong Selatan	95,97	3,3
3	Suli	79,75	2,74
4	Suli Barat	190,33	6,54
5	Belopa	32,08	1,1
6	Kamanre	51,92	1,78
7	Belopa Utara	30,63	1,05
8	Bajo	58,98	2,03
9	Bajo Barat	106,49	3,66
10	Bassesangtempe	275,77	9,48
11	Latimojong'	338,71	11,64
12	Bassesangtempe Utara	146,56	5,04
13	Bupon	157,97	5,43
14	Ponrang	110,11	3,79
15	Ponrang Selatan	97,09	3,34
16	Bua	177,39	6,1
17	Walenrang	43,12	1,48
18	Walenrang Timur	66,89	2,3
19	Lamasi	42,47	1,46
20	Walenrang Utara	243,58	8,37
21	Walenrang Barat	253,04	8,7
22	Lamasi Timur	65,19	2,24
Jumlah		**2909,08**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2021

Gambar 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Luwu

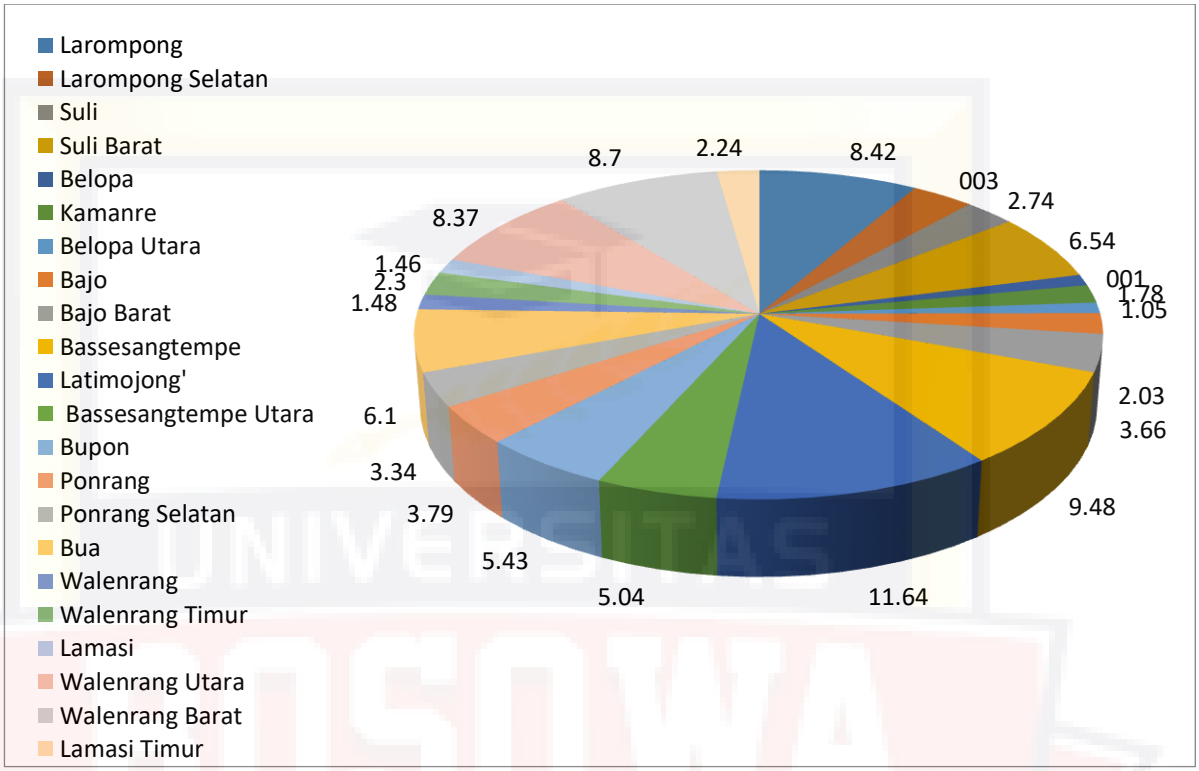

Berdasarkan tabel dan diagram di atas Kecamatan Latimojong merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan persentase sebesar 11,64 % dari total Luas wilayah kabupaten luwu Sedangkan Kecamatan Belopa Utara merupakan kecamatan terkecil yang berada di Kabupaten Luwu dengan Persentase hanya sebesar 1,05 % dari total luas wilayah Kabupaten Luwu.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu

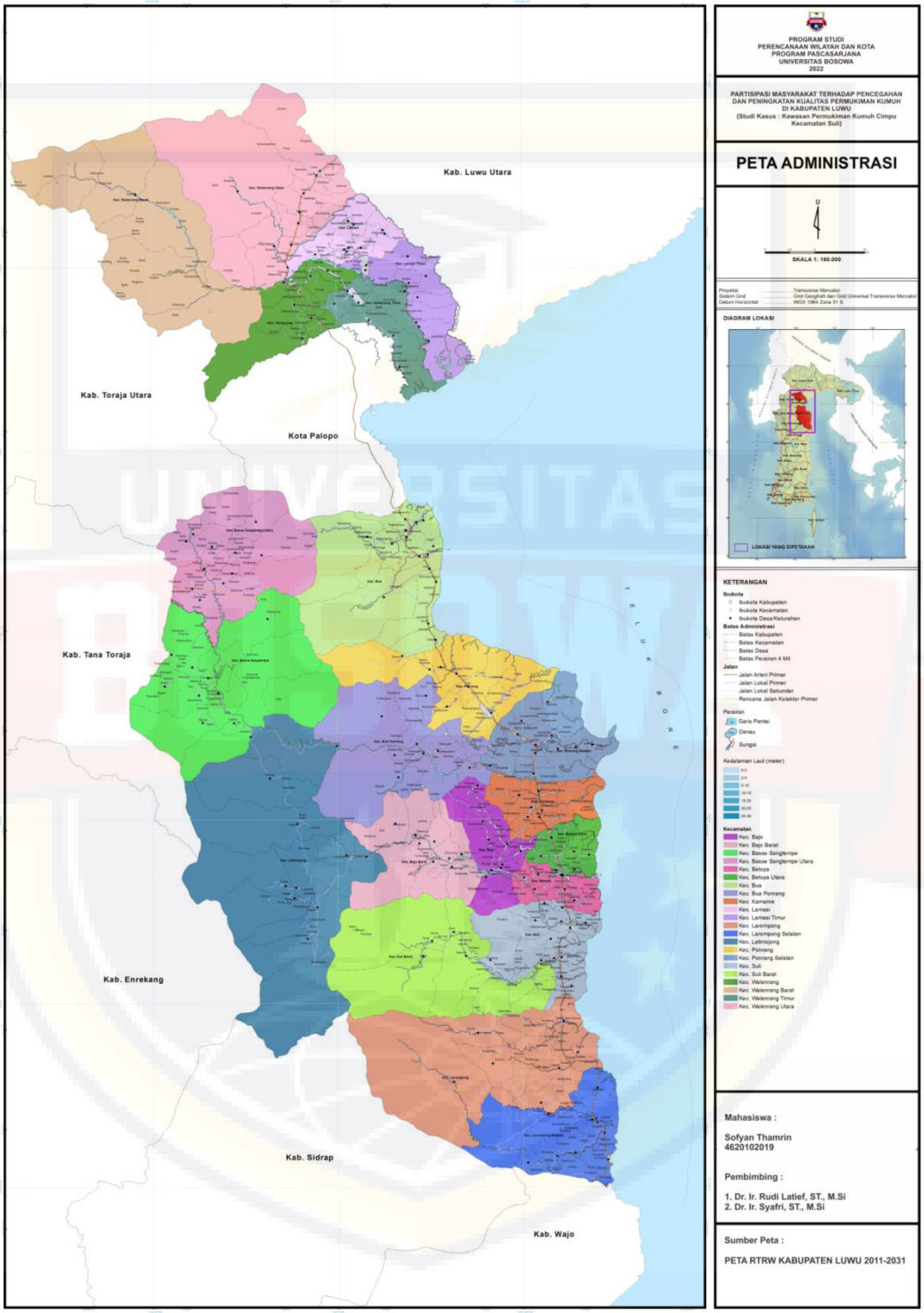

b. Topografi

Secara umum wilayah Kabupaten Luwu merniliki ketinggian wilayah diatas 1000 mdpl dengan luas wilayah sek

itar 71.960,19 Ha atau 24,39% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, Hal tersebut memberikan gambaran bahwan morfologi Kabupaten Luwu merniliki kondisi beragam mulai dari morofologi data, berombak/ bergelombang lemah, bergelombang kuat, bergelombang sedang, berbukit, bergunung-gunung hingga memiliki sunga. Disisi lain terdapat wilayah dengan ketinggian 0-25 dengan luas 58.260,66 Ha atau 19,74%, ketinggian 25-100 luas 43.745,41 Ha atau 14,83%, ketinggian 100-500 luas 66.081,09 Ha atau 22,39% dan 500-1000 memiliki luas 27.264,24 Ha atau 9, 13%. Secara rinci terkait morofologi dan ketinggian wilayah Kabupaten Luwu

Tabel 4.2 Topografi dan Kelerengan Kabupaten berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2021

NO	KECAMATAN	MORFOLOGI							
		DATAR	BERGELOMBANG LEMAH	BERGELOMBANG KUAT	BERBUKIT SEDANG	BERBUKIT TINGGI	BERGUNUNG GUNUNG	SUNGAI	TOTAL
1	Bajo	2716,67		687,35		457,73	2013,77	22,23	5897,76
2	Bajo Barat	1205,67		431,12			8941	71,7	10649,49
3	Basse Sangtempe	0,31					27462,86	114,09	27577,26
4	Bassesangtempe Utara				5168,82		9401,58	85,48	27577,26
5	Belopa	2677,35		176,09		343		11,79	3208,23
6	Belopa Utara	2967,36				91,59		3,54	3062,49
7	Bua	4317,49	122,68	1207,8	914,11	473,56	10632,94	70,43	17739,01
8	BuaPonrang	3266,37	719,46	1089,66	212,15	810,16	9588,5	110,47	15796,77
9	Kamanre	5096,27				79,46		16,59	5192,32
10	Lamasi	3807,51				400,63		38,48	4246,62
11	Lamasi Timur	6369,07						150,87	6519,94

12	Larompong	3610,11		1100,09		8638,31	11035,64	119,96	24504,11
13	Larompong Selatan	1110,13	1945,03	132,9		2082,8	4203,7	122,01	9596,58
14	Latimojong	0,54					33769,49	101,09	33871,11
15	Ponrang	7221,79			611,22	148,19	2989,7	39,57	11010,47
16	Ponrang Selatan	9576,53				95,94		36,27	9708,75
17	Suli	4484,97		576,76		867,52	2033,87	12,32	7975,44
18	Suli Barat	1354,81		16,31		2262,32	15392,52	7,36	19033,32
19	Walenrang	2594,87				74,68	1604,56	37,56	4311,67
20	Walenrang Barat	59,14			39		25141,62	64,47	25304,23
21	Walenrang Timur	6404,46					183,62	101,33	6689,4
22	Walenrang Utara	1959,74	2000,89	0		245	20026,57	125,73	24357,92
	TOTAL	**70801,17**	**4788,06**	**5418,06**	**6945,29**	**17070,88**	**184421,96**	**1463,35**	**290908,78**

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2021

Gambar 4.3 Peta Morfologi Kabupaten Luwu

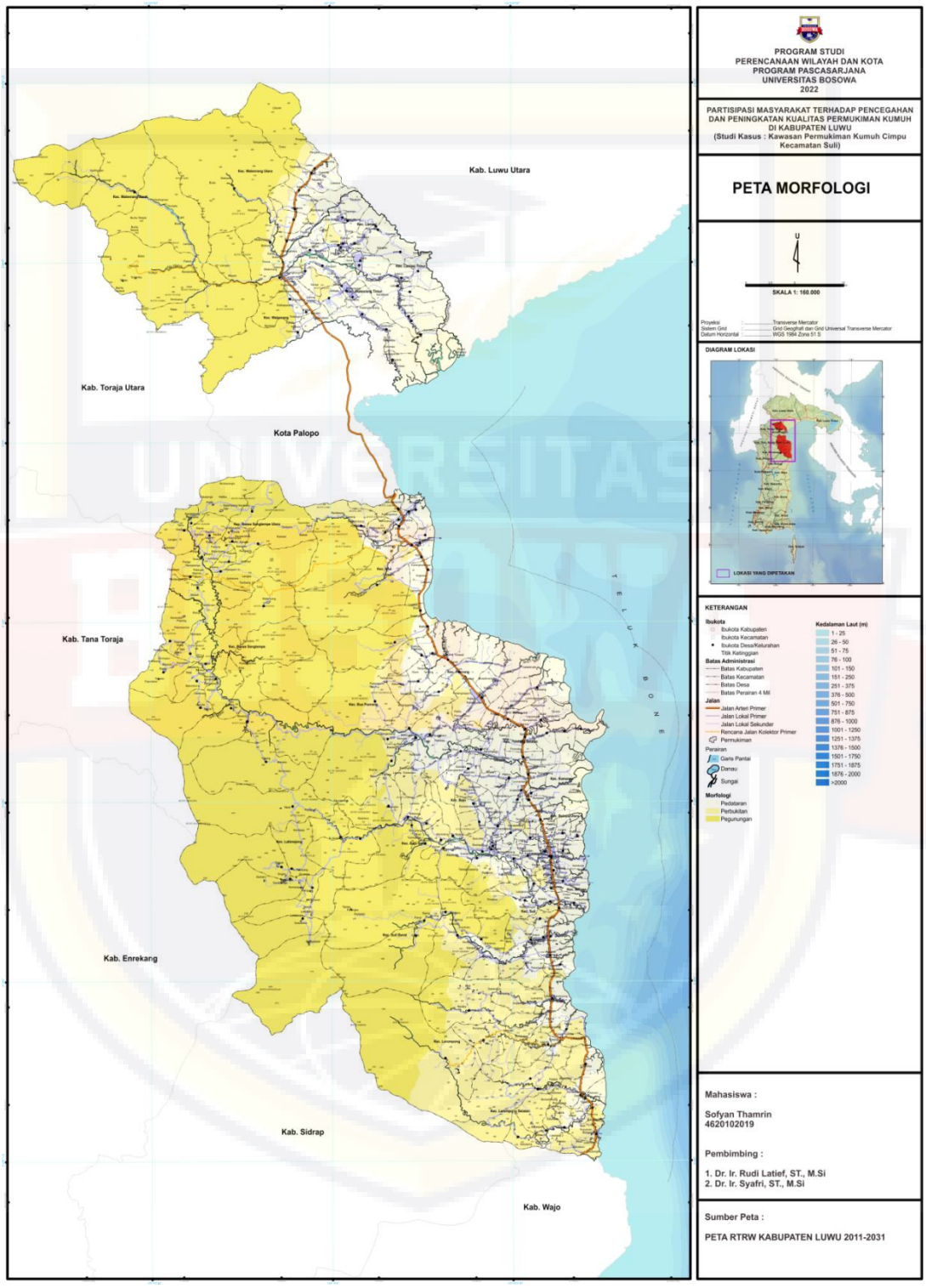

Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Luwu

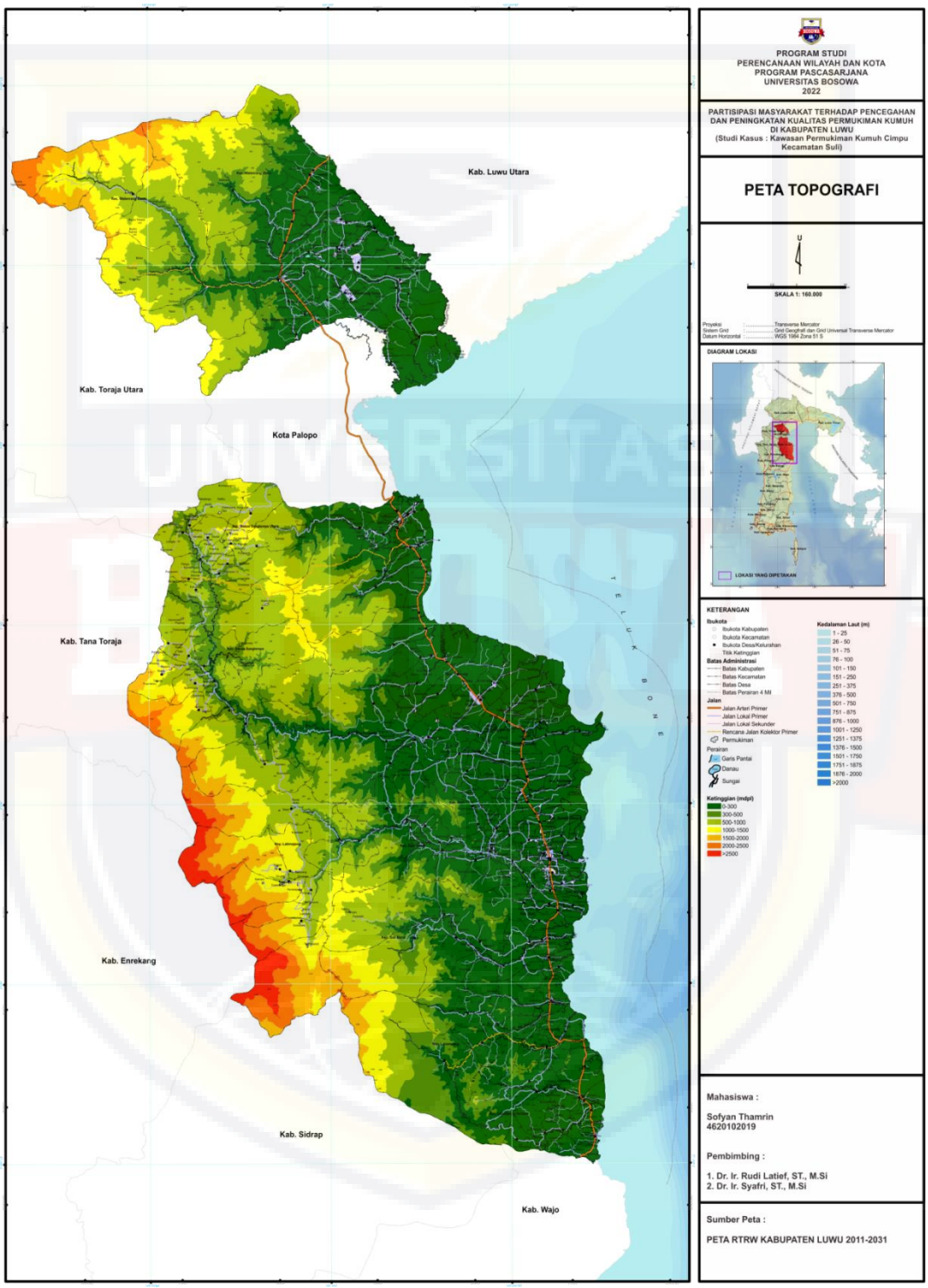

c. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan diatas 40% dengan luas wilayah sekitar 236.815,24 Ha atau 62,11% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan 0-8% dengan luas 42.094,88 Ha atau 14,10%, kemiringan 8-15% memiliki luas 29.696,28 Ha atau 9,94%, kemiringan 15-25% memiliki luas 14.089,65 Ha atau 4,72% dan 25-40% memiliki luas 27.264,24 Ha atau 9,13%. Hal tersebu Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini

Tabel 4.3
Luas Daerah dan Persentase Ketinggian Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kab. Luwu, Tahun 2021

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN WILAYAH (ALTITUDE)									
		0-25		25-100		100-500		500-1000		1000+	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Larompong	1.807,54	3,1	944,92	2,16	9.479,15	14,34	3 728,15	6,77	3 563	4,95
2	Larompong Selatan	2.776,64	4,77	4.760,38	10,88	4.636,21	7,02	926,09	1,68	-	-
3	Suli	4.080,06	7	3.057,23	6,99	1.034,03	1,56	-	-	-	-
4	Suli Barat	121,38	0,21	3.338,78	7,63	3.806,05	5,76	3 939,32	7,16	4 143	5,76
5	Belopa	4.716,05	8,09	1.207,83	2,76	-	-	-	-	-	-
6	Kamanre	4.975,49	8,54	265,37	0,61	-	-	-	-	-	-
7	Belopa Utara	3.471,66	5,96	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bajo	1.896,63	3,26	2.311,73	5,28	2.642,47	4	-	-	-	-
9	Bajo Barat	316,83	0,54	1.342,11	3,07	2.268,42	3,43	2 468,06	4,49	234,15	0,33
10	Basseangtempe	-	-	-	-	9.601,02	14,53	12 130,84	22,04	8 366	11,63
11	Latimojong	-	-	-	-	6.524,25	9,87	8 964,08	16,29	31 285	43,4
12	Basseangtempe Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Bupon	1.969,25	3,38	5.306,79	12,13	7.440,40	11,26	3547,47	6,45	-	-
14	Ponrang	5.864,46	10,07	1.716,70	3,92	1.348,64	2,04	1 779,23	3,23	-	-
15	Ponrang Selatan	9.996,12	17,16	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bua	6.105,67	10,48	4.274,99	9,77	4.445,76	6,73	6 573,21	10,13	-	-
17	Walenrang	-	-	4.310,23	9,85	1.943,32	2,94	2 144,70	3,9	2 144	2,98
18	Walenrang Timur	4.086,96	7,01	2.277,59	5,21	-	-	-	-	-	-

19	Lamasi	913,66	1,57	17,6	0,04	287,8	0,44	-	-	-	-
20	Walenrang Utara	-	-	8.012,55	18,32	10.300,64	15,59	6 701,78	12,18	960,23	1,33
21	Walenrang Barat	-	-	-	-	322,93	0,49	3 125,62	5,68	21 261,6	295
22	Lamasi Timur	5.162,26	8,86	600,61	1,37	-	-	-	-	-	-

Sumber :Interpretasi Peta Kabupaten Luwu Tahun 2021

d. Jenis Tanah Dan Batuan

Sumber daya tanah wilayah Kabupaten Luwu bervariasi ditiap kecamatan baik yang tersebar di daerah pegunungan ataupun di daerah pesisir. Lingkup daerah pesisir cenderung memiliki bentuk tanah datar dengan jenis tanah aluvial coklat kekelabuan di Kecamatan Larompong. Kecamatan Larompong juga terdapat daerah perbukitan dengan jenis tanah gromusol kelabu dan mediteran coklat kelabuan dengan struktur bahan induk batu gamping & serpih. Daerah sepanjang pesisir memiliki jenis tanah yang hampir sama dari selatan Larompong hingga utara Kecamatan Bua dari garis pantai dan bagian daratan utama banyak endapan lumpur dan menjadi daerah pemanfaatan pertambakan. Permukaan tanah yang berbukit berada diketinggiad di atas 60 meter di Kecamatan Bajo Barat dengan jenis tanah gromusol kelabu dengan batuan induk batu gamping dan serpih merupakan daerah pemanfaatan perkebunan untuk komoditas unggulan Luwu yaitu Kakao. Kondisi yang sama juga terdapat di Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Besseng Tempe yang berada diketinggian diatas

l00meter memiliki jenis tanah mediteran coklat kelabuan, grumusol kelabu, aluvial hidromorf (daerah basah), aluvial hidromorf (daerah basah), podsolik merah kekuningan. Berikut ini data potensi jenis tanah di wilayah Kabupaten Luwu.

Tabel 4.4
Jenis Tanah dan Luas penyebarannya di Kabupaten Luwu

NO	JENIS TANAH	LUAS	PERSENTASE
1	Aluvial	0,61	0
2	Gleisol	14333,55	4,93
3	Kambisol	49301,5	16,95
4	Litosol	32,27	0,01
5	Oksisol	3,97	0
6	Organosol	1228,05	0,42
7	Podsolik	167182,71	57,47
8	Regosol	4760,48	1,64
9	Singkapan Batuan	1,39	0
10	No Data	54064,24	18,58
	TOTAL	**290908,78**	**100**

Sumber : Interpretasi Peta Kabupaten Luwu Tahun 2020

Gambar 4.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Luwu

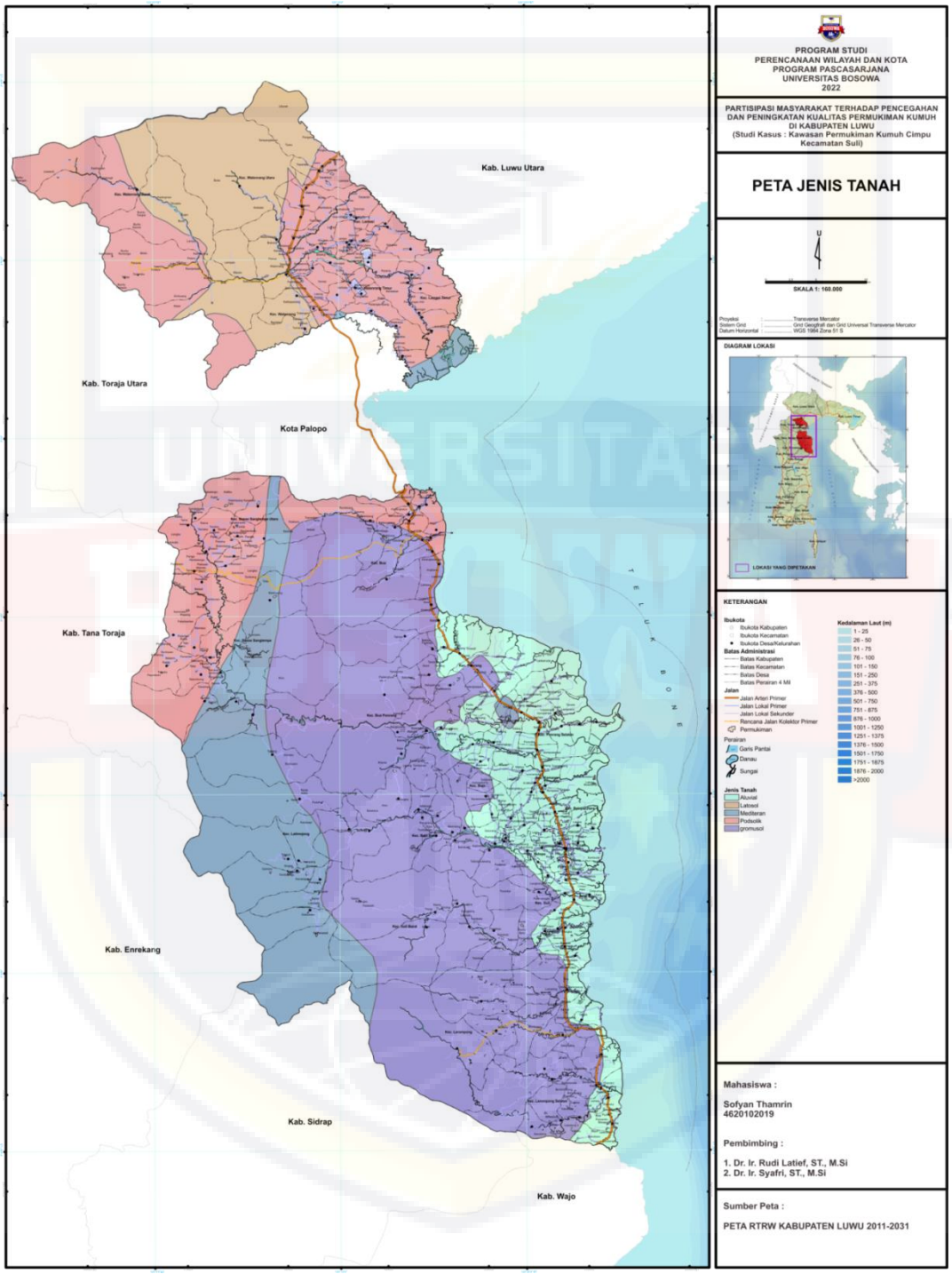

e. Kependudukan

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari penduduk. Dengan adanya penduduk, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan. keluarga secara berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik (BPS), menunjukkan Kabupaten Luwu saat ini di huni penduduk kurang lebih 367.454 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang. Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada penjelasan Tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE (%)
1	Larompong	22613	6,15
2	Larompong Selatan	17895	4,87
3	Suli	21461	5,84
4	Suli Barat	10129	2,76
5	Belopa	19680	5,36
6	Kamanre	11983	3,26
7	Belopa Utara	18773	5,11
8	Bajo	16468	4,48

9	Bajo Barat	10169	2,77
10	Bassesangtempe	5750	1,56
11	Latimojong'	5943	1,62
12	Bassesangtempe Utara	7487	2,04
13	Bupon	15483	4,21
14	Ponrang	27621	7,52
15	Ponrang Selatan	25518	6,94
16	Bua	32838	8,94
17	Walenrang	18325	4,99
18	Walenrang Timur	15734	4,28
19	Lamasi	22902	6,23
20	Walenrang Utara	18734	5,1
21	Walenrang Barat	8316	2,26
22	Lamasi Timur	13632	3,71
	Jumlah	367454	100

Sumber : BPS Kab. Luwu, 2021

Gambar 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2021

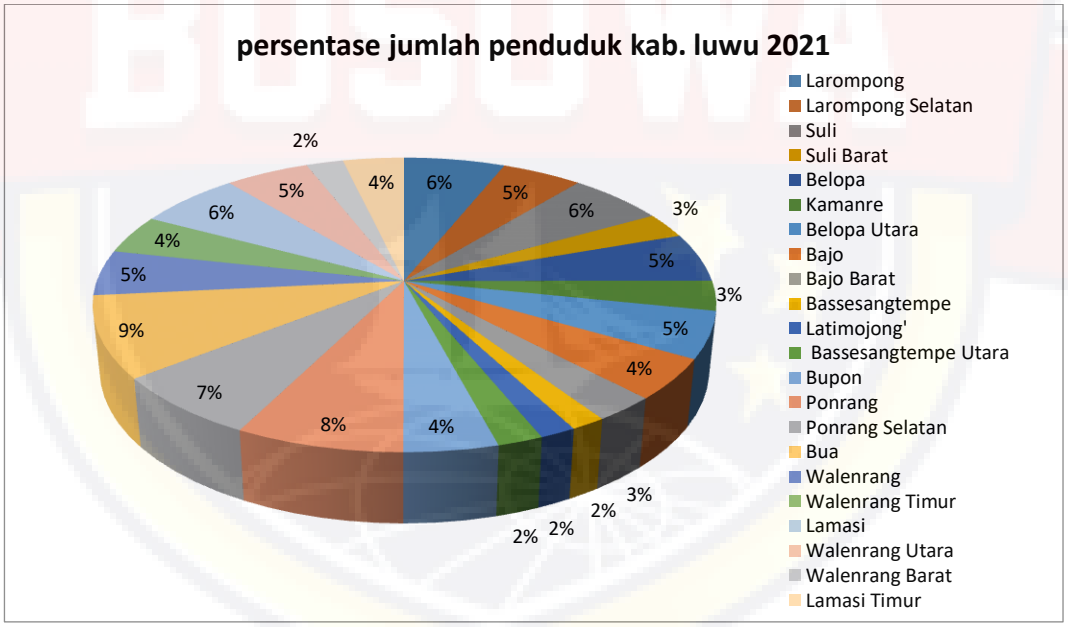

f. Peggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2015 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Luwu 52,01

persen digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal, kebun, lading, huma, tambak, kolam, tebat, empang, sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2015 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 300.025 hektar, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 31.048, 10 hektar dari 300.025 hektar lahan pertanian tersebut 38.429 Hektar, diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan lahan bukan sawah 230.547 Hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.6 Luas setiap Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Luwu

NO	TUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Bandara	61,84	0,02
2	Hamparan Pasir	206,07	0,07
3	Hutan	185534,56	63,78
4	Hutan Mangrove	313,39	0,11
5	Ladang	16757,66	5,76
6	Lahan Terbuka	2818,11	0,97
7	Padang rumput	434,21	0,15
8	Perkebunan	8492,69	2,92
9	Permukiman	5153,58	1,77
10	Sawah	43610,88	14,99
11	Semak belukar	12986,02	4,46
12	Sungai	1454,58	0,5
13	Tambak ikan/udang	13085,2	4,5
	TOTAL	**290908,78**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Luwu tahun 2020 Intrepretasi Citra Satelit Spot 6 Tahun 2017

2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan

a. Aspek Fisik Dasar

1) Letak Geografis dan Administrasi

Kecamatan Suli merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu. Adapun batasan administrasinya meliputi:

- Utara : Kecamatan Belopa
- Timur : Teluk Bone
- Barat : Kecamatan Larompong

- Selatan : Suli Barat

Sebanyak 6 Desa/kelurahan di Kecamatan Suli bukan merupakan daerah pantai dan 7 Desa/Kelurahan lainnya merupakan daerah pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukiman laut yang beragam, dengan luas wilayah ± 81,75 Km^2. Penduduk Kecamatan Suli sebanyak 21.272 jiwa yang tersebar disetiap Desa dan Kelurahan.

Tabel 4.7 Luas Wilayah Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Suli

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS KM^2	PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN (%)
1	Towondu	5,79	7,08
2	Murante	5,85	7,16
3	Suli	9,25	11,31
4	Buntu Kunyi	8,33	10,19
5	Lempopacci	6,25	7,65
6	Botta	17,17	21
7	Padang Lambe	16	19,57
8	Cakkeawo	3,12	3,82
9	Malela	5,4	6,61
10	Cimpu	3,39	4,15
11	Kasiwiang	3,12	3,82
12	Papakaju	9	11,01
13	Cimpu Utara	6,2	7,58
	Total	81,75	100

Sumber: Kecamatan Suli Dalam Angka Tahun 2021

2) Topografi

Tinggi wilayah Kecamatan Suli berkisar antara 0 – 500 m di atas permukaan laut. Adapun wilayah topografi Kecamatan Suli terbagai atas 2 bagian, yaitu daerah pantai dan daerah bukan pantai. Terdapat 6 desa/kelurahan daerah pantai yaitu Desa

Towondu, Desa Murante, Desa Buntu Kunyi, Desa Cimpu, Desa Cimpu Utara dan Kelurahan Suli. Sedangkan 7 Desa lainnya yaitu Desa Lempopacci, Desa Botta, desa Padang Lambe, Desa Cakkeawo, Desa Malela, Desa Kasiwiang dan Desa Papakaju merupakan daerah bukan pantai.

3) Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kecamatan Suli yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu air tanah (sumur dalam dan dangkal) dan air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya). Air sumur dangkal sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat dapat diperoleh dengan mudah yang kedalaman rata-ratanya adalah 5 sampai 10 meter, sedangkan untuk sumur dengan menggunakan sistem pengeboran yang dapat mencapai kedalaman antara 15 sampai 30 meter. Selain itu masyarakat yang tidak terjangkau dan tidak mendapatkan kedua golongan air tersebut, dapat memperoleh jaringan air PDAM yang belum menjangkau seperdua dari penduduk yang bermukim di Kecamatan Suli.

4) Klimatologi

Kecamatan Suli termasuk daerah yang beriklim tropis. Suhu rata-rata di Kecamatan Suli dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi tiap tahunnya.

Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan Desember hingga bulan April. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah. Selain itu, kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik sehingga semakin memicu timbulnya bencana banjir.

5) Geologi

Jenis tanah di Kecamatan Suli, yaitu jenis tanah liatosol dan aluvial. Tanah Litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini juga disebut tanah azonal. Sedangkan tanah aluvial merupakan jenis tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian.

b. Demografi

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan Suli memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.272 jiwa yang terbagi dalam 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Suli. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Suli dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Suli 2021

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Towondu	655	692	1.347
2	Murante	978	1.007	1.985
3	Suli	2.320	2.397	4.717
4	Buntu Kunyi	701	690	1.391
5	Lempopacci	536	491	1.027
6	Botta	889	863	1.752
7	Padang Lambe	493	453	946
8	Cakkeawo	467	482	949
9	Malela	822	887	1.709
10	Cimpu	1.027	991	2.018
11	Kasiwiang	494	514	1.008
12	Papakaju	349	344	693
13	Cimpu Utara	831	899	1.730
	Total	**10.562**	**10.710**	**21.272**

Sumber: KecamatanLuwu Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah 10.710 jiwa dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang hanya berjumlah 10.562 jiwa.

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kawasan Kumuh Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, lebih tepatnya berada Desa Cimpu dan Desa Cimpu Utara dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan kawasan yang saat ini menjadi lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan oleh SK Bupati nomor 219/IV/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu yang mana kawasan Kumuh Cimpu merupakan kawasan kumuh sedang dengan Pertimbangan lain tinggi.

Secara administrasi Kawasan Kumuh Cimpu memliki Luas wilayah mencapai 11,96 Ha yang terbagi kedalam 2 Dusun yaitu Dusun muara utara dan dusun Muara Selatan yang mana posisi geografis terletak pada 120°23’56,967”E 3°26’0,304”S dengan Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Cimpu pada Tahun 2022 adalah 3.748 jiwa yang tersebar di dua Desa.

Gambar 4.7 Peta Administrasi Kecamatan Suli

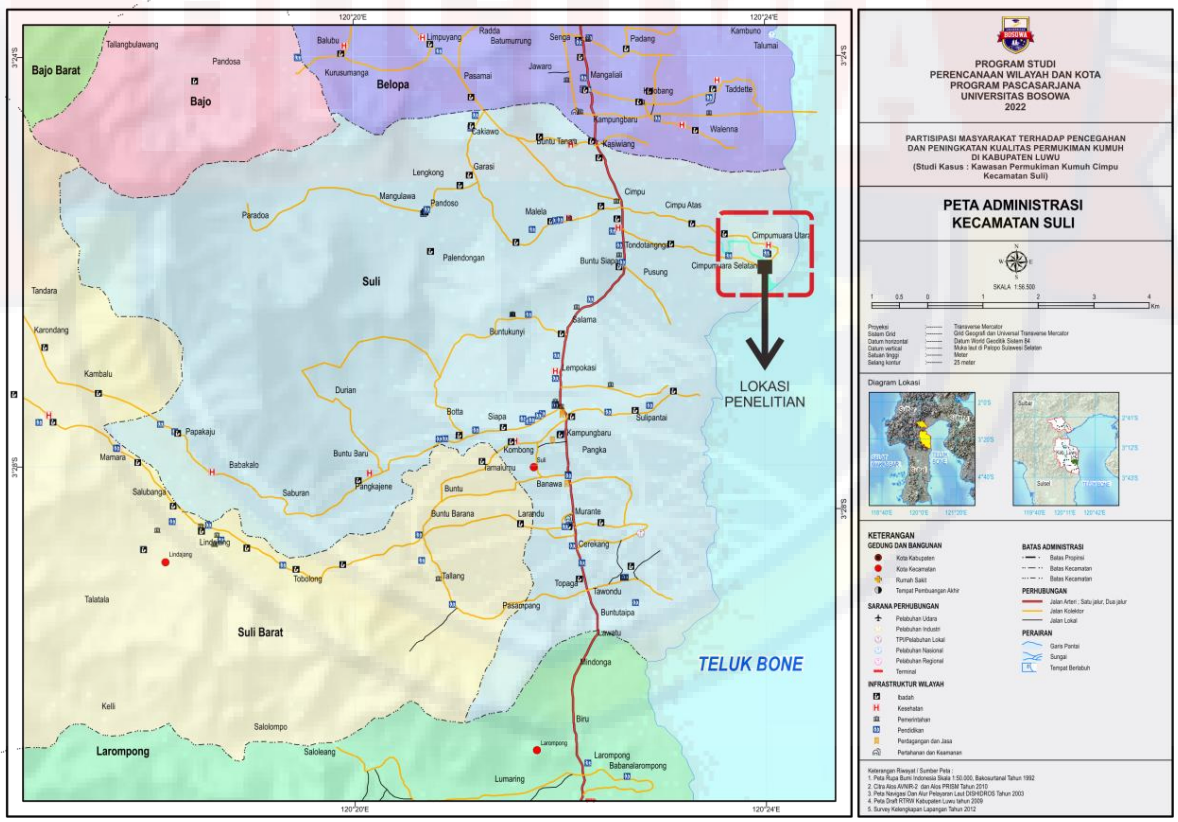

Gambar.4.8 Peta Lokasi Penelitian Kawasan Kumuh Cimpu

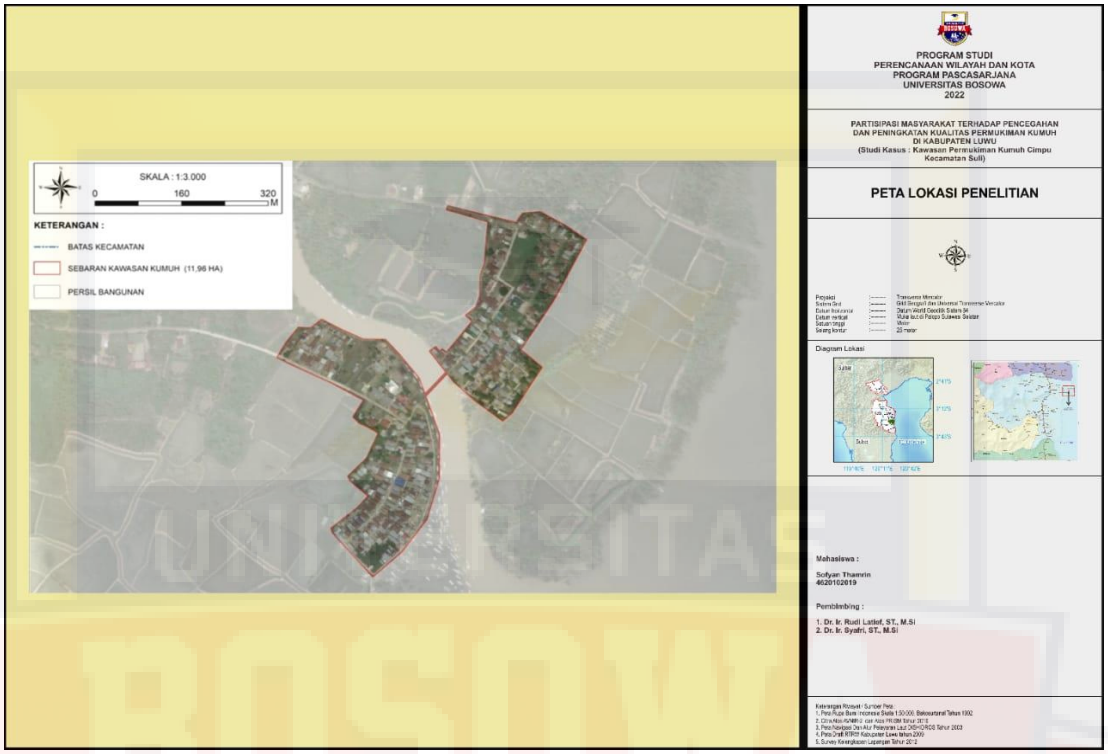

a. Profil dan Karakteristik Kawasan Penelitian

1) Bangunan Gedung

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan, kondisi bangunan gedung di Kawasan Kumuh Cimpu memiliki ketidak teraturan bangunan, bangunan memiliki tingkat kepadatan tinggi dan masih banyaknya rumah tidak layak huni atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan (tidak memenuhi kecukupan luas, keamanan,kenyamanan, kesehatan, kemudahan

2) Kondisi Jalan Lingkungan

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang dinamis dan berkelanjutan sangat dipengaruhi perkembangan sistem

transportasi yang ada. Perkembangan sistem transportasi ini terwujud dalam jaringan yang membentuk pola-pola perkembangan wilayah. Jaringan jalan sangat berperan dalam memacu pertumbuhan wilayah, dalam pembentukan pola permukiman terkait dengan delimitasi kawasan terbangun dan estetika lingkungan serta interaksi antar lingkungan serta interaksi antar lingkungan permukiman, sehingga dapat memudahkan penataan pola permukiman yang lebih teratur. Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi jalan lingkungan masih belum memenuhi minimum lebar badan jalan. Berdasarkan kondisi spesifikasi dilokasi penelitian masih cukup banyak menggunakan jalan tanah dan belum perkerasan , sedangkan jalan aspal hanya beberapa ruas yang dalam keadaan baik, selebihnya aspal dalam keadaan buruk dan tidak dilengkapi dengan saluran disamping jalan. Jaringan jalan merupakan prasarana penghubung antar wilayah atau kawasan, oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku.

3) Kondisi Penyedian Air Bersih

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi penyediaan air bersih belum terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, seperti yang kita ketahui air minum/ bersih merupakan suatu kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara oleh masyarakat sumber air yang digunakan lebih dominan

menggunakan Sumur Bor untuk Air minum. Air bersih menjadi syarat mutlak yang harus tersedia disetiap wilayah untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat karena air bersih adalah kebutuhan pokok setiap individu guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

4) Kondisi Drainase Lingkungan

Jaringan Drainase di lokasi penelitian juga mengalami masalah seperti wilayah lainnya di kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Luwu yaitu sebagian besar kondisi drainase mengalami sedimentasi dan tumpukan sampah yang mengakibatkan aliran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehigga biasa mengakibatkan terjadinya banjir dalam kawasan kumuh tersebut. Selain itu sistem jaringan drainase yang terdapat di lokasi penelitian merupakan sistem jaringan drainase terbuka yang mengikuti pola jaringan jalan.

5) Kondisi Pengolahan Air Limbah

Aktivitas mandi, buang air kecil, buang air besar, mencuci dan sebaginya pasti menghasilkan air limbah. Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi pengelolaan air limbah di lokasi penelitian belum baik karena sistem pengelohan air limbah tiap rumah belum sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan beberapa kk belum memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyartan teknis

6) Pengolahan Persampahan

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penduduk di Kawasan Kumuh Cimpu masih secara konvensional, yaitu dengan cara membuat lubang tempat sampah yang kemudian dilakukan pembakaran atau penimbunan atau membuang ke bagian belakang pekarangan rumah, akibatnya pengelolaan persampahan di masyarakat menjadi kumuh dan kurang dikelola dengan baik, didukung dengan prasarana persampahan dilokasi penelitian juga tidak terpenuhi seperti tidak adanya tempat penampungan sementara (TPS) yang layak untuk pengelolaan sampah.Oleh karena itu dibutuhkan sasaran rencana kebutuhan pelayanan persampahan yang dikategorikan jumlah kebutuhan penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan.

7) Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan hidup ini erat kaitnya dengan penghasilan seseorang.

B. Analisis Tingkat Kekumuhan

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Parameter Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu

Kawasan	Informasi lokasi					Aspek	Parameter Data	Kondisi	
	Luas (ha)	Koordinat	Lingkungan	Kel/Desa	Kec			Jumlah	Satuan
Cimpu	11,96	120° 23' 56,967" E – 3° 26' 0,304" S	Dusun Muara Utara & Dusun Muara Selatan	Cimpu dan Cimpu Utara	Suli	Bangunan Gedung	Bangunan/rumah yang tidak memiliki keteraturan	297	**Unit**
							Bangunan memiliki tingkat kepadatan tinggi tidak sesuai ketentuan ((Luas kawasan dengan kepadatan ≥ 250 unit/Ha untuk kota besar dan ≥200 unit/Ha untuk kota sedang/kecil))	25	**Ha**
							Bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis bangunan (kecukupan luas, keamanan,kenyamanan, kesehatan, kemudahan)	112	**Unit**
						Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan (Panjang Jalan Ideal)	7128,00	**Meter**
							Cakupan Pelayanan Jalan (Panjang Jalan Eksisting)	1000,00	**Meter**
							Panjang jalan dengan permukaan jalan rusak (yang sudah terstruktur aspal/paving block/beton)	6128,00	**Meter**
						Penyediaan air minum	Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar)	200	**KK**
							Penduduk yg belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari)	112	**KK**
						Drainase Lingkungan	Luas area yang terkena genangan (Genangan dengan >30cm, >2 jam , >	**10,50**	**Ha**

Kawasan	Informasi lokasi					Aspek	Parameter Data	Kondisi	
	Luas (ha)	Koordinat	Lingkungan	Kel/Desa	Kec			Jumlah	Satuan
							2x per tahun)		
							Panjang Drainase Ideal	7128,00	**Meter**
							Panjang saluran drainase Eksisting	1000,00	**Meter**
							Panjang saluran drainase dengan kualitas konstruksi buruk	6128,00	**Meter**
						Pengelolahan air limbah	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	200	**KK**
							Jumlah KK dengan Sarana Prasarana air limbah tidak sesuai dengan standar teknis	112	**KK**
						Pengelolahan persampahan	Jumlah KK dengan sarana prasarana pengelolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar teknis	200	**KK**
							Jumlah KK dengan sistem pengelolahan sampah tidak sesuai dengan standar teknis	112	**KK**
						Proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	297	**Unit**
							Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	297	**Unit**

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2022

Tabel 4.10 Kriteria dan Indikator Penentuan Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A.	**Idenfikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)**					
1.	**Kondisi Bangunan Gedung**	**Ketidakteraturan Bangunan**	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RTRW, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	Dokumen RTRW & RPJMD, Format Isian Observasi

		Tingkat Kepadatan Bangunan	• KDB melebihi ketentuan RTRW, dan/atau RTBL
			• KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
			• Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu :
			  ○ Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha
			  ○ Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha
				• 76% -100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RTRW & RPJMD, Dukumen IMB Format Isian Peta Lokasi

		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			• Keselamatan bangunan gedung (BG) • Kenyamanan BG • Kemudahan BG			
2.	**Kondisi Jalan Lingkungan**	**Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan**	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi dan Observasi
		Kualitas Permukaan JalanLingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 51% -75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi dan Observasi
3.	**Kondisi Penyediaan Air Minum**	**Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum**	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 51%-75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
4.	**Kondisi Drainase Lingkungan**	**Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air**	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali setahun	• 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
		Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran local	• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
		Ketidakterhubungan dengan Sistem	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki	• 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di	3	Wawancara, Format Isiani,

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		Drainase Perkotaan	di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	atasnya		Peta GIS dan Observasi
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman,baik : • Pemeliharaan rutin ; dan/atau • Pemeliharaan berkala	• 76% -100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
5.	**Kondisi Pengelolaan Air Limbah**	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak SesuaiStandar Teknis**	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana : • Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; • Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	• 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
6.	**Kondisi Pengelolaan Persampahan**	**Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis**	Prasarana dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu :	• 75% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			• Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; • Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan • Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan			
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : • Pewadahan dan pemilahan domestik; • Pengumpulan lingkungan; • Pengangkutan lingkungan; • Pengolahan lingkungan	• 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : • Pemeliharaan rutin; dan/atau • Pemeliharaan berkala	• 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
7.	**Kondisi Proteksi Kebakaran**	**Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran**	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : • Pasokan air; • Jalan lingkungan; • Sarana komunikasi;	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			• Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan • Bangunan pos kebakaran			
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Mobil pompa; • Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan • Peralatan pendukung lainnya	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
B.	**Identifikasi Legalitas Lahan**					
1.	**Legalitas Lahan**	**Kejelasan status penguasaan Lahan**	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa : • Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau • Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain	• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	Wawancara, Format Isiani, Dokumen Pertanahan dan Observasi
		Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK)	• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan / permukiman sesuai RTR	(-)	Wawancara, Format Isiani, Dokumen RTRW, RDTR dan Observasi
C.	**Idenfikasi Pertimbangan Lain**					
1.	**Pertimbangan**	**Nilai Strategis Lokasi**	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau	• Lokasi terletak pada fungsi	5	Wawancara,

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	Lain		permukiman pada: • Fungsi strategis kabupaten/kota; atau • Bukan fungsi strategis kabupaten/kota	strategis kabupaten/kota		Format Isiani, Dokumen RTRW, RDTR dan Observasi
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : • Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 • jiwa/ha; • Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha • Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha • Sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha	• Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <150 jiwa/Ha	1	Wawancara, Format Isiani, Statistik dan Observasi
		Kondisi Sosial, ekonomi dan budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa : • Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isiani dan Observasi

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016

Tabel 4.11 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Cimpu

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
KONDISI KEKUMUHAN																			
71 – 95	Kumuh Berat	x	x	X	x	X	x												
45 – 70	Kumuh Sedang							x	x	X	x	x	x						
19 – 44	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
LEGALITAS LAHAN																			
(+)	Status Lahan Legal	x		X		X		x		X		x		x		x		x	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		x		x		x		x		x		x		x		x		x
PERTIMBANGAN LAIN																			
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi	x	x					x	x					x	x				
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	x					x	x		
1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah					X	x					x	x					x	x
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel analisis penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu maka tingkat kekumuhan, Pertimbangan Lain dan Legalitas Lahan Kawasan Cimpu yaitu:

a. Kawasan Kumuh Cimpu

Dari tabel analisis penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Cimpu maka tingkat kekumuhan, Pertimbangan Lain dan Legalitas Lahan Kawasan Kumuh Cimpu yaitu:

- Tingkat Kekumuhan: **Kumuh Sedang** (Total Nilai 58)
- Legalitas Lahan: Legal
- Perimbangan Lain: **Tinggi** (Total Nilai 11)

C. Analisis Faktor-Faktor Determinan Penyabab Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel Bangunan Gedung (X_1), Jalan Lingkungan (X_2), Penyediaan Air Minum (X_3), Drainase Lingkungan (X_4), Pengelolaan Air Limbah (X_5), Pengelolaan Persampahan (X_6), Proteksi Kebakaran (X_7) dan Status Kepemilikan Tanah (X_8) terhadap Tingkat Kekumuhan. Perhhitungan statistik dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program SPSS V.23.

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Adapun uji yang digunakan untuk menguji data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

1) Uji Validitas

Uji validitas merupakan prosedur untuk memastikan data yang dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak valid. Data dapat katakan valid apabila benar – benar tepat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan nilai *Corrected* item Total *Correlation* atau nilai r hitung > dari r tabel, maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini digunakan 90 responden dengan r tabel = 0,207. Jadi, item pertanyaan yang nilainya lebih besar dari 0,207 dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Validatas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Tingkat Kumuh	Y	0,553	0,207	Valid
Bangunan Gedung	X.1	0,837	0,207	Valid
Jalan Lingkungan	X.2	0,805	0,207	Valid
Penyediaan Air Minum	X.3	0,783	0,207	Valid
Drainase Lingkungan	X.4	0,796	0,207	Valid
Pengelolaan Air Limbah	X.5	0,749	0,207	Valid
Pengelolaan Persampahan	X.6	0,763	0,207	Valid
Proteksi Kebakaran	X.7	0,52	0,207	Valid
Status Kepemilikan Lahan	X.8	0,789	0,207	Valid

Sumber: Hasil Analisis SPSS 23 (2022)

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kuesioner yang digunakan reliabel. Dikatakan reliabel apabila jawaban pertanyaan konsisten atau stabil dalam waktu ke waktu. Pada uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* yakni jika angka reliabilitas *Cronbach Alpha* melebihi angka 0,60 maka jawaban pertanyaan dapat dipercaya dan dapat digunakan. Hasil penguji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13 Hasil Uji Rehabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
Tingkat Kumuh	0,869	Reliabel
Bangunan Gedung	0,834	Reliabel
Jalan Lingkungan	0,844	Reliabel
Penyediaan Air Minum	0,804	Reliabel
Drainase Lingkungan	0,839	Reliabel
Pengelolaan Air Limbah	0,862	Reliabel
Pengelolaan Persampahan	0,833	Reliabel
Proteksi Kebakaran	0,867	Reliabel
Status Kepemilikan Lahan	0,825	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis SPSS 23 (2022)

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasiik digunakan untuk menguji asumsi - asumsi yang diperlukan sebelum analisis regresi linier berganda. Ujiasumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji muktikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Maka dilakukan uji normalitas Kolmogorov-smimov. Suatu data regresi dapat dikatakan normal apabila nilai signifikasi uji Kolmogorov-smimov lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh

angka *asymp* sig 0,100 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan data yang digunakan normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (variasi) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat digunakan uji glejser. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Diketahui nilai signifikansi untuk semua variabel lebih besar di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis ini diuji berdasarkan uji koefisien determinasi (R2), Uji simultan (F test), dan uji parsial (Uji t) dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 23.

1) **Koefisien Determinasi (R2)**

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Eror Of the Estimate
1	.607a	.301	.054	1.004
a. Predictors: (Constant), Status Kepemilikan Lahan, Proteksi Kebakaran, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah				

Sumber: Hasil Analisis SPSS 23 (2022)

Berdasarkan hasil uji Koefisien determinasi menunjukan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,054 hal ini berarti kondisi Status Kepemilikan Lahan, Proteksi Kebakaran, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Pegelolaan Persampahan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah mempengaruhi Tingkat Kekumuhan Sebesar 54%.

2) **Uji Simultan**

Uji simultan merupakan uji F yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan (bersama-sama atau gabungan) terhadap variabel Y. Berikut merupakan hasil uji simultan (uji F) :

Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46.132	8	5.766	5.720	.000[b]
	Residual	81.657	81	1.008		
	Total	127.789	89			
a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh						
b. Predictors: (Constant), Status Kepemilikan Lahan, Proteksi Kebakaran, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah						

Sumber: Hasil Analisis SPSS 23 (2022)

Berdasarkan hasil Uji Simultan menunjukan bahwa nilai F hitungan sebesar 5.720 dengan tingkat signifikasi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dimana nilai F hitung 5.720 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesa1,99 hal ini berarti aspek dari Status Kepemilikan Lahan, Proteksi Kebakaran, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Pegelolaan Persampahan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah secara Bersama – sama berpengaruh terhadap Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu.

3) Uji Parsial

Uji parsial merupakan uji T yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial (terpisah) terhadap variabel Y. Berikut merupakan hasil uji parsial (uji T) :

Tabel 4.16 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Ket
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.957	.834		7.143	.000	Berpengaruh
	Bangunan Gedung	.223	.053	.599	4.221	.260	Berpengaruh
	Jalan Lingkungan	.104	.094	.168	.003	.998	Tidak Berpengaruh
	Penyediaan Air Minum	.161	.103	.217	1.560	.123	Berpengaruh
	Drainase Lingkungan	.145	.149	.220	1.202	.271	Berpengaruh
	Pengelolaan Air Limbah	.206	.146	.219	1.414	.161	Berpengaruh
	Pengelolaan Persampahan	.128	.152	.122	.846	.400	Berpengaruh
	Proteksi Kebakaran	.135	.178	.082	.757	.451	Berpengaruh
	Status Kepemilikan Lahan	.061	.094	.090	.651	.517	Tidak Berpengaruh
a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh							

Sumber: Hasil Analisis SPSS 23 (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui model persamaan regresi yang digunakan adalaah sebagai berikut:

$Y = 5{,}957 + 0{,}223\ X_1 + 0{,}104\ X_2 + 0{,}161\ X_3 + 0{,}145\ X_4 + 0{,}206\ X_5 + 0.128\ X_6 + 0.135\ X_7 + 0.061\ X_8$

Berdasarkan hasil diatas hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis Pengaruh Bangunan Gedung terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_1 (Bangunan Gedung) memiliki t hitung 4.221 > t tabel 1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,223 dan tingkat signifikansi 0,260 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti kondisi Pengaruh Bangunan Gedung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

2. **Analisis Pengaruh Jalan Lingkungan terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_2 (Jalan Lingkungan) memiliki t hitung 1.108 > t tabel 1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,104 dan tingkat signifikansi 0,998 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti kondisi Pengaruh Jalan Lingkungan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

3. **Analisis Pengaruh Penyediaan Air Minum terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_3 (Penyediaan Air Minum) memiliki t hitung 1.560 > t tabel 1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,161 dan tingkat signifikansi 0,123 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti

kondisi Pengaruh Penyediaan Air Minum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

4. **Analisis Pengaruh Drainase Lingkungan terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_4 (Drainase Lingkungan) memiliki t hitung 1,202 > t tabel 1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,0 dan tingkat signifikansi 0,123 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti kondisi Pengaruh Penyediaan Drainase Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

5. **Analisis Pengaruh Pengolahan Air Limbah terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_5 (Pengelolaan Air Limbah) memiliki t hitung 1.414 > t tabel 1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,206 dan tingkat signifikansi 0,161 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti kondisi Pengaruh Pengelolaan Air Limbah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

6. **Analisis Pengaruh Pengolahan Persampahan terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_6 (Pengelolaan Persampahan) memiliki t hitung 1.414 > t tabel

1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,128 dan tingkat signifikansi 0,400 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti kondisi Pengaruh Pengelolaan Persampahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

7. **Analisis Pengaruh Proteksi Kebakaran terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_7 (Proteksi Kebakaran) memiliki t hitung .757 > t tabel 1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,138 dan tingkat signifikansi 0,451 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti kondisi Pengaruh Proteksi Kebakaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

8. **Analisis Pengaruh Status Kepemilikan Lahan terhadap Tingkat Kekumuhan**

   Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X_8 (Status Kepemilikan Lahan) memiliki t hitung .651 > t tabel 1.990 dengan *coefficients beta unstandardized* sebesar 0,061 dan tingkat signifikansi 0,517 > *probabilitas* 0,05, maka hal ini berarti kondisi Pengaruh Status Kepemilikan Lahan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kekumuhan.

D. Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh Cimpu

Konsep dan Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan juga disusun berdasarkan konsep penangan kumuh berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018.

Untuk penetapan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh Cimpu peneliti mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska (2020) yang menagngkat penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh yakni :

1. Faktor yang bersifat langsung

   Faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan sinitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan menimbukan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan dan lain-lain, sedangkan faktos sanitasi lingkungan yang menimbulkan perasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus,

penelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase dan jalan.

2. Faktor yang bersifat tidak langsung

   Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep penangan setiap kawasan kumuh akan berbeda sesuai dengan isu dan permasalahan masing-masing kawasan kumuh tersebut. Kawasan Cimpu memiliki tipologi permukiman kumuh di tepian air /wilayah pesisir. Konsep makro penangan kawasan kumuh di Kawasan Cimpu adalah: Pencegahan, Pemugaran, dan Peremajaan Kawasan.

Adapun Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, ialah:

a. Konsep Pencegahan

Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru di Kawasan Cimpu meliputi:

- **Pengawasan dan Pengendalian:** Kesesuaian Terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Konsep pencegahan kawasan ini di titik beratkan pada area atau zona memiliki kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan (GSB, GSS,GSJ,IMB dan lainnya)

b. Konsep Peningkatan Kualitas

Konsep peningkatan kualitas yang diterapkan di Kawasan Kumuh Cimpu meliputi Pemugaran dan Peremajaan Kawasan. **Konsep Pemugaran** merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami penurunan kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain. Konsep ini merupakan penangan permukiman yang sifatnya berupa meningkatakan kualitas permukiman yang sudah ada. Ciri kawasan yang sesuai untuk ditangani melalui *upgrading* adalah kawasan yang memiliki *pattern* kawasan regular, status tanah legal (secara

tata ruang maupun kepemilikan lahan), dan kepadatan kawasan sangat tinggi.

Konsep Pemugaran yang dilakukan di Kawasan Kumuh Cimpu antara lain:

- Rehabilitas bangunan gedung agar sesuai dengan persyaratan teknis bangunan sebanyak 112 unit bangunan
- Rehabilitas jalan untuk mengembalikan kondisi jalan saat awal dibangun, meliputi perbaikan jalan rusak.
- Rehabilitas sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan.
- Rehabilitas unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan meliputi optimalisasi SPAM 112 unit.
- Penerapan : Peningkatan Kualitas Permukiman

Sedangkan **konsep peremajaan** diterapkan pada permukiman kumuh yang secara tata ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik. Kondisi buruk secara struktur dapat mendorong terciptanya pemanfaatan ruang yang tidak efisien dan optimal sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Adapun konsep peremajaan yang dilakukan di Kawasan kumuh antara lain:

- Peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga dan peningkatan pengelolaan limbah komunal untuk kawasan padat penduduk.
- Peningkatan gerobak/motor sampah untuk mengangkut sampah di Kawasan Kumuh Cimpu.
- Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa Hydrant pemadam kebakaran dan pump truck.

Gambar.4.9 Profil Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh Cimpu

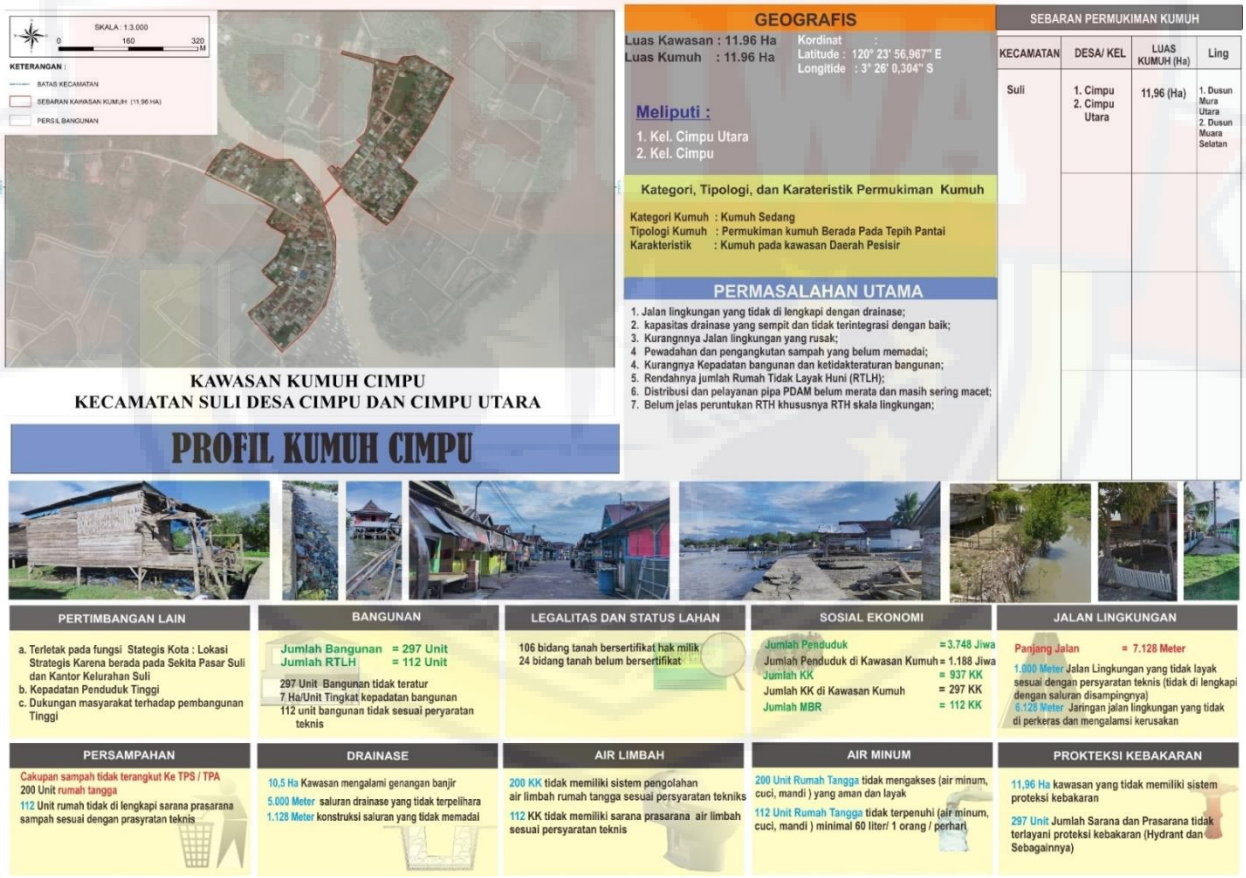

TABEL 4.17 KONSEP DAN STRATEGI KAWASAN KUMUH CIMPU

No	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Bangunan Gedung	bangunan hunian 297 (unit) tidak memiliki keteraturan dan lingkungan permukiman tidak memiliki akses jalan dan tidak menghadap ke jalan	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan	Perubahan fungsi dan massa bangunan	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan	pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan rumah, pembangunan/pelebaran akses jalan
					Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
					Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan &pengendalian pembangunan permukiman			
		Sebanyak 112 (Unit)bangunan berada pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Rehabilitasi bangunan gedung	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Rehabilitasi rumah
					Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
2	Jalan kolektor dan arteri	Area tidak terlayani oleh jaringan jalan kolektor sepanjang 7.128 (meter)	Pengawasan dan pengendalian terhadap lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan kolektor dan arteri yang sesuai dengan ketentuan teknis	Pembangunan jalan baru	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan pembangunan jalan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akses jalan koletor dan arteri	Pembangunan jalan baru	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
		Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 6.128 (meter)	Pengawasan dan pengendalian terhadap sebagian atau seluruh	Peningkatan kualitas jaringan jalan koletor dan arteri	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan	Melakukan perbaikan jalan

No	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			jalan koletor dan arteri pada lokasi perumahan atau permukiman yang mengalami kerusakan permukaan jalan.				melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	
			Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan koletor dan arteri	Pembangunan pedestrian	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
				Rehabilitasi pedestrian				
3	Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum 200 (KK)	Pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	Pembangunan akses air minum aman dan layak	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan pembangunan dan perbaikan akses air minum aman dan layak
				Penyambungan perpipaan PDAM	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Penyambungan perpipaan PDAM
			Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat					
			Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akses air minum					
		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 112 (KK)	Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air minum masyarakat pada lokas i perumahan atau permukiman yang tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari	Peningkatan jaringan instalasi air bersih termasuk sistem sambungan	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan pembangunan Bak Pembagi
			Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akses untuk mencukupi kebutuhan air minum	peningkatan sambungan rumah sehingga dapat menjangkau permukiman	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Mengadakan hidrant
				Pembangunan Bak Pembagi				Pengadaan SR

No	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
4	Drainase sekunder dan primer		Pengawasan dan pengendalian terhadap Jaringan drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.	Rehabilitasi drainase sekunder dan primer	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan Pembangunan drainase sekunder dan primer
			Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah terjadinya genangan		Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan pembangunan kolam resistensi
		Ketidaktersediaan Drainase 1.000 (meter)	Pengawasan dan pengendalian terhadap saluran sekunder dan primer yang tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	Pembangunan drainase sekunder dan primer dengan model U-Ditch	Pengawasan dan pengendalian	Peremajaan	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan pembangunan drainase
			Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan drainase baru		Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan pembangunan gorong-gorong
		Kualitas Konstruksi Drainase 6.128 (meter)	Pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas konstruksi drainase sekunder dan primer yang buruk	Peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder dan primer	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan perbaikan drainase
			Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase	Normalisasi drainase sekunder dan primer	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan pemeliharaan drainase
			Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disaluran drainase.					Menormalisasi drainase
			Pemberdayaan masyarakat dalam					Pengerukan sedimentasi

No	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			pembersihan saluran drainase dari sedimentasi dan sampah yang ada					
6	Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak memiliki sistem yang memadai	Peningkatan kualitas sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan pembangunan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL
			Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi	Pembangunan Ipal Komunal	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan pemeliharaan septictank dan IPALkomunal
			Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengelolaan air limbah					
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 112 (KK)	Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman	Pembangunan dan atau perbaikan MCK Komunal	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan pembangunan dan perbaikan MCK
			Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi		Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan pemeliharaan MCK
7	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 200 KK	Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengadaan kontainer sampah	Pengawasan dan pengendalian	Peremajaan	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan perbaikan bangunan TPS3R
			Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Peningkatan Kualitas TPS3R	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Pembangunan landasan dan Mengadakan kontainer sampah
			Memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan	Pengadaan alat pencacah sampah				Melakukan pemeliharaan TPS

No	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya membuang sampah pada tempatnya (tidak disungai atau di pantai) dan tidak dibakar					Melakukan Pengadaan alat pencacah sampah Pembersihan sampah pada sempadan pantai
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 112 (KK)	Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak memenuhi persyaratan	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengawasan dan pengendalian	Peremajaan	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan sampah pasar	Melakukan pengumpulan, pewadahan dan pemilahan sampah domestic	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Mengadakan armada pengangkut sampah
			Memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengolahan sampah untuk mereduksi timbulan sampah sampai ke TPA.	Pengadaan dan penambahan armada pengangkutan sampah dan penambahan rute pengangkutan sampah untuk mempercepat pengangkutan sampah dari TPS ke TPA				Menambahkan rute/ jalur pengangkutan
8	Sistem Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 unit bangunan	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman	Pengadaan sarana komunikasi dan	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Mengadakan alat komunikasi
			Memberikan sosialisasi terkait informasi data sistem proteksi kebakaran	Penyediaan data sistem proteksi kebakaran di skala kawasan.	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Menyediakan data sistem proteksi kebakaran
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 297 unit	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman	Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang dapat masuk ke permukiman	Pengawasan dan pengendalian	Pemugaran	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	Melakukan Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang dapat masuk ke permukiman

No	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Memberikan sosialisasi terkait cara penggunaan Hidrant dan cara menangani kebakaran.	Pengadaan mobil tangga sesuai kebutuhan	Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Pengadaan mobil tangga
9	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	Penerapan RTH minimal 20%	Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Publik	Pengawasan dan pengendalian	Back to nature	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	
			Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan RTP dan RTH		Pemberdayaan masyarakat		Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan pembangunan dan perbaikan area kuliner
			Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat di akses oleh semua baik penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lansia)				peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan UMKM, Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan	

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen PU No. 2 Tahun 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa tahapan dan proses dalam penelitian, menghasilkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan, masih luasnya area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk**.** Selain itu masih luasnya area yang memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau**,** dan juga di Kawasan Kumuh Cimpu tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2. Berdasarkan hasil analisis faktor determinan yang menyebabkan tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Cimpu adalah kondisi bangunan gedung, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan dan proteksi kebakaran.

3. Alternatif Konsep dan Strategi pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terdiri atas dua, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Konsep pencegahan dilaksanakan melalui pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, berupa pemuatan regulasi terkait pembebasan lahan, sosialisasi dan pendampingan. Sedangkan konsep peningkatan kualitas dilaksanakan melalui pola pemugaran dan peremajaan sarana dan Prasarana utilitas seperti jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah dan persampahan. Serta arahan konsep untuk pemugaran bangunan gedung permukiman, jalan, limbah komunal dan sistem proteksi kebakaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini agar ditindak lanjuti secara nyata, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini memeperlihatkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan variabel yang digunakan, sehingga terdapat juga variabel yang berpengaruh dari luar terhadap pengaruh terbentuknya permukiman kumuh.
2. Diharapkan kepada studi selanjutnya sebaiknya mencari variabel baru dari penataan Kawasan permukiman kumuh, tidak hanya mengacu pada variable sosial ekonomi dan faktor fisik lingkungan

saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat terlihat menarik untuk di kaji dan dibahas

3. Perlu adanya penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai strategi pencegahan ataupun penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan munculnya temuan-temuan baru yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Pemerintah Republik Indonesia, (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.

Anonim, Pemerintah Republik Indonesia, (2011). Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.

Damis, D.M., Kumurur, V.A., & Sela,R.L.E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur,* 6(1), 163-172.

Budiharjo, Eko. (1997). Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, Penerbit Djambatan, Jakarta

Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.

Anonim, Pemerintah Kabupaten Luwu, (2022). SK Bupati Nomor 219/IV/2022 Tentang Penepatan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Luwu.

Etta Mamang Sangadji, Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian. Yogyakarta.

Muhajir Syam. (2017). Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman Di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Jurnal Teknik UIN Alauddin.

Vivut Anggra. (2018). Analisis Tingkat Kekumuhan dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

Surtiani, E. E. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga).* Program Pascasarjana Universitas Diponegara.

Anonim, Panduan Penyusunan RP2KPKP, (2018). Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Permukiman Kumuh Perkotaan.

Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, *4*(1), C33-C35.

Dzulqarnain. (2018). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Nelayan *(Studi Kasus Permukiman Kumuh Nelayan Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)*

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

JUDUL: PARTSIPSI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DIKABUPATEN LUWU (Studi Kasus : Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli)

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang penanganan permukiman kumuh Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Oleh karena ditengah-tengah kesibukan bapak/ibu saya sebagai peneliti memohon dengan hormat agar kiranya bapak/ibu bersedia mengisi kuesioner berikut. Atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu saya atas nama SOFYAN THAMRIN Universitas Bosowa Makassar Program Studi Perencaaan Wilayah dan Kota Angkatan 2020 mengucapkan banyak terima kasih.

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :

B. PETUNJUK

1. Baca dengan teliti pernyataan sebelum memberi jawaban
2. Jawaban dengan jujur tanpa pengaruh orang
3. Berilah tanpa checklist pada jawaban yang dipilih

   Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

C. DAFTAR PERNYATAAN

1. Tingkat Kekumuhan (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Kawasan Cimpu merupakan kawasan yang terdampak kekumuhan	✓			
2	Penyebab kekumuhan disebabkan karena terdapat beberapa sarana yang tidak memadai		✓		
3	Salah satu faktor penyebab kekumuhan yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil				

2. Kondisi Bangunan ($X_{1)}$

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Status kepemilikan rumah saudara adalah rumah pemerintah				
2	Satatus tanah rumah yang saudara huni adalah hak pakai				
3	Kondisi bangunan rumah tempat tinggal saudara buruk				
4	Jenis bangunan rumah tempat tinggal saudara adalah temporer				
5	Material atap bangunan rumah saudara rumbia				
6.	Material lantai bangunan rumah saudara bamboo				
7	Material dinding bangunan rumah saudara adalah beton				

3. Air Limbah (X_2)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Belum tersedia MCK di rumah tempat tinggal saudara				
2	Kualitas MCK di rumah tempat tinggal saudara				
3	Tempat pembuangan limbah saudara di Sungai				
4	Tempat pembuangan limbah tinja saudara bukan septitank				

4. Air Bersih (X_3)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Sumber air bersih saudara adalah Air hujan				
2	Kebutuhan air bersih saudara belum terpenuhi				
3	kondisi air bersih saudara berbau				

5. Kondisi Infrastruktur (X_4)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Kondisi jalan di lingkungan permukiman saudara tanah/krikil pengerasan				
2	Kondisi jalan di lingkungan permukiman saudara buruk				

6. Drainase (X_5)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Belum tersedia saluran drainase di lingkungan permukiman saudara				
2	Kondisi saluran drainase di lingkungan permukiman saudara buruk				

7. Persampahan (X_6)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Tempat pembuangan sampah saudara adalah Sungai/saluran irigasi/drainase				
2	Sistem pengangkutan sampah di lingkungan permukiman saudara >2x seminggu				

8. Proteksi Kebakaran (X_7)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Belum tersedia sarana pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal saudara				

9. Status Lahan (X_8)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Status bangunan yang saudara huni merupakan milik pihak lain				
2	Status legalitas bangunan yag saudara huni belum memiliki IMB				
3	Status lahan bangunan yang saudara huni merupakan milik pihak lain				

HASIL PENGOLAHAN SPSS

Correlations

		Tingkat Kumuh	Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan
Tingkat Kumuh	Pearson Correlation	1	.526**	.311**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003
	N	90	90	90
Bangunan Gedung	Pearson Correlation	.526**	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	90	90	90
Jalan Lingkungan	Pearson Correlation	.311**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	
	N	90	90	90
Penyediaan Air Minum	Pearson Correlation	.214*	.533**	.654**
	Sig. (2-tailed)	.042	.000	.000
	N	90	90	90
Drainase Lingkungan	Pearson Correlation	.332**	.533**	.581**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000
	N	90	90	90
Pengelolaan Air Limbah	Pearson Correlation	.347**	.392**	.449**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000
	N	90	90	90
Pengelolaan Persampahan	Pearson Correlation	.375**	.469**	.474**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	90	90	90
Proteksi Kebakaran	Pearson Correlation	.160	.286**	.304**
	Sig. (2-tailed)	.132	.006	.004
	N	90	90	90
Status Kepemilikan Lahan	Pearson Correlation	.402**	.534**	.478**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	90	90	90
VAR00005	Pearson Correlation	.553**	.837**	.805**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	90	90	90

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46.132	8	5.766	5.720	.000[b]
	Residual	81.657	81	1.008		
	Total	127.789	89			

a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh

b. Predictors: (Constant), Status Kepemilikan Lahan, Proteksi Kebakaran, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah

a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh

Coefficient Correlations[a]

Model			Status Kepemilikan Lahan	Proteksi Kebakaran	Jalan Lingkungan
1	Correlations	Status Kepemilikan Lahan	1.000	.069	.091
		Proteksi Kebakaran	.069	1.000	.030
		Jalan Lingkungan	.091	.030	1.000
		Drainase Lingkungan	-.083	-.041	-.128
		Penyediaan Air Minum	-.115	-.081	-.359
		Pengelolaan Persampahan	-.300	-.184	-.020
		Bangunan Gedung	-.253	-.031	-.585
		Pengelolaan Air Limbah	-.255	-.222	.003
	Covariances	Status Kepemilikan Lahan	.009	.001	.001
		Proteksi Kebakaran	.001	.032	.001
		Jalan Lingkungan	.001	.001	.009
		Drainase Lingkungan	-.001	-.001	-.002
		Penyediaan Air Minum	-.001	-.001	-.003
		Pengelolaan Persampahan	-.004	-.005	.000
		Bangunan Gedung	-.001	.000	-.003
		Pengelolaan Air Limbah	-.004	-.006	3.444E-5

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change

1	.601[a]	.361	.298	1.00405	.361	5.720

Model Summary[b]

Model	Change Statistics		
	df1	df2	Sig. F Change
1	8	81	.000

a. Predictors: (Constant), Status Kepemilikan Lahan, Proteksi Kebakaran, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah

b. Dependent Variable: Tingkat Kumuh

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46.132	8	5.766	5.720	.000[b]
	Residual	81.657	81	1.008		
	Total	127.789	89			

a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh

b. Predictors: (Constant), Status Kepemilikan Lahan, Proteksi Kebakaran, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Bangunan Gedung, Pengelolaan Air Limbah

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	

1	(Constant)	5.957	.834		7.143
	Bangunan Gedung	.223	.053	.599	4.221
	Jalan Lingkungan	-.104	.094	-.168	-1.108
	Penyediaan Air Minum	-.161	.103	-.217	-1.560
	Drainase Lingkungan	.000	.149	.000	.003
	Pengelolaan Air Limbah	.206	.146	.219	1.414
	Pengelolaan Persampahan	.128	.152	.122	.846
	Proteksi Kebakaran	-.135	.178	-.082	-.757
	Status Kepemilikan Lahan	.061	.094	.090	.651

Coefficients[a]

Model			95,0% Confidence Interval for B	
		Sig.	Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	.000	4.297	7.616
	Bangunan Gedung	.000	.118	.328
	Jalan Lingkungan	.271	-.292	.083
	Penyediaan Air Minum	.123	-.366	.044
	Drainase Lingkungan	.998	-.296	.296
	Pengelolaan Air Limbah	.161	-.084	.497
	Pengelolaan Persampahan	.400	-.174	.431
	Proteksi Kebakaran	.451	-.489	.219
	Status Kepemilikan Lahan	.517	-.126	.248

a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh

Coefficient Correlations[a]

Model			Status Kepemilikan Lahan	Proteksi Kebakaran	Jalan Lingkungan
1	Correlations	Status Kepemilikan Lahan	1.000	.069	.091
		Proteksi Kebakaran	.069	1.000	.030
		Jalan Lingkungan	.091	.030	1.000
		Drainase Lingkungan	-.083	-.041	-.128
		Penyediaan Air Minum	-.115	-.081	-.359
		Pengelolaan Persampahan	-.300	-.184	-.020
		Bangunan Gedung	-.253	-.031	-.585
		Pengelolaan Air Limbah	-.255	-.222	.003
	Covariances	Status Kepemilikan Lahan	.009	.001	.001
		Proteksi Kebakaran	.001	.032	.001
		Jalan Lingkungan	.001	.001	.009
		Drainase Lingkungan	-.001	-.001	-.002
		Penyediaan Air Minum	-.001	-.001	-.003
		Pengelolaan Persampahan	-.004	-.005	.000
		Bangunan Gedung	-.001	.000	-.003
		Pengelolaan Air Limbah	-.004	-.006	3.444E-5

Coefficient Correlations[a]

Model			Drainase Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Persampahan
1	Correlations	Status Kepemilikan Lahan	-.083	-.115	-.300

		Proteksi Kebakaran	-.041	-.081	-.184
		Jalan Lingkungan	-.128	-.359	-.020
		Drainase Lingkungan	1.000	-.188	-.124
		Penyediaan Air Minum	-.188	1.000	-.034
		Pengelolaan Persampahan	-.124	-.034	1.000
		Bangunan Gedung	-.099	.030	-.056
		Pengelolaan Air Limbah	-.320	-.162	-.283
	Covariances	Status Kepemilikan Lahan	-.001	-.001	-.004
		Proteksi Kebakaran	-.001	-.001	-.005
		Jalan Lingkungan	-.002	-.003	.000
		Drainase Lingkungan	.022	-.003	-.003
		Penyediaan Air Minum	-.003	.011	-.001
		Pengelolaan Persampahan	-.003	-.001	.023
		Bangunan Gedung	-.001	.000	.000
		Pengelolaan Air Limbah	-.007	-.002	-.006

Coefficient Correlations[a]

Model			Bangunan Gedung	Pengelolaan Air Limbah
1	Correlations	Status Kepemilikan Lahan	-.253	-.255
		Proteksi Kebakaran	-.031	-.222
		Jalan Lingkungan	-.585	.003
		Drainase Lingkungan	-.099	-.320
		Penyediaan Air Minum	.030	-.162
		Pengelolaan Persampahan	-.056	-.283

	Bangunan Gedung	1.000	.147
	Pengelolaan Air Limbah	.147	1.000
Covariances	Status Kepemilikan Lahan	-.001	-.004
	Proteksi Kebakaran	.000	-.006
	Jalan Lingkungan	-.003	3.444E-5
	Drainase Lingkungan	-.001	-.007
	Penyediaan Air Minum	.000	-.002
	Pengelolaan Persampahan	.000	-.006
	Bangunan Gedung	.003	.001
	Pengelolaan Air Limbah	.001	.021

a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	8.1781	11.6581	10.4111	.71995	90
Residual	-2.97710	2.42694	.00000	.95786	90
Std. Predicted Value	-3.102	1.732	.000	1.000	90
Std. Residual	-2.965	2.417	.000	.954	90

a. Dependent Variable: Tingkat Kumuh

Charts

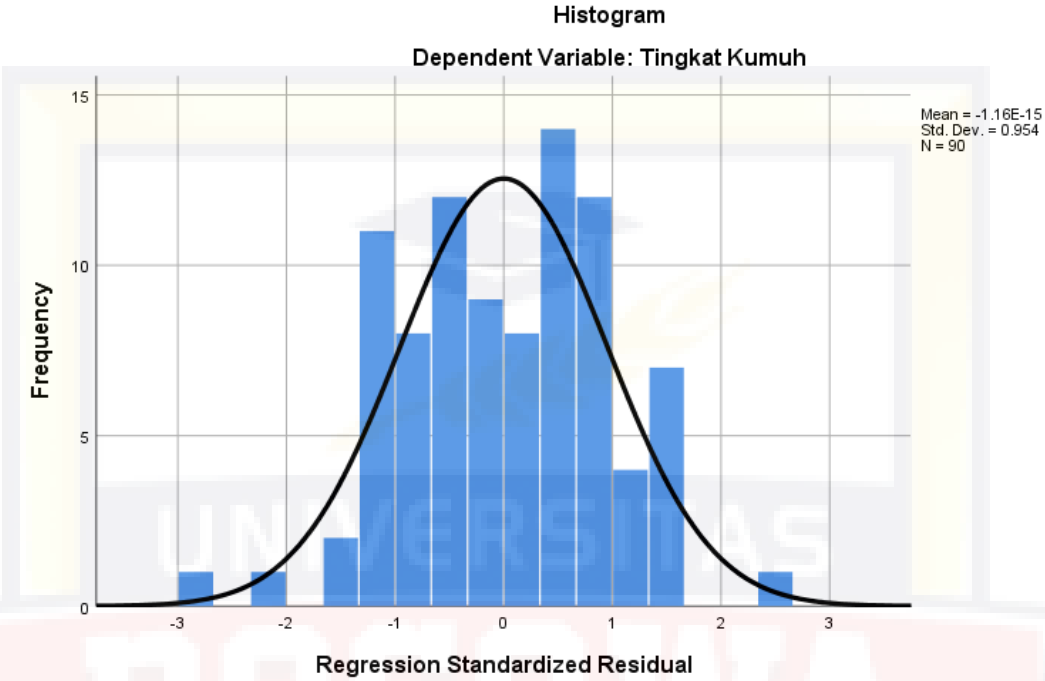
Histogram
Dependent Variable: Tingkat Kumuh
Mean = -1.16E-15
Std. Dev. = 0.954
N = 90
Frequency
15
10
5
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
Regression Standardized Residual

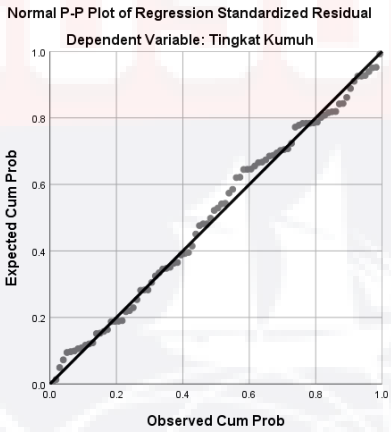
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Tingkat Kumuh
Expected Cum Prob
Observed Cum Prob
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Sofyan Thamrin, Judul tesis "**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN LUWU (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli).** Penulis Lahir di Cilallang 41 Tahun. Latar belakang Pendidikan, SD Negeri 40 Cilallang (1987-1993), Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Cilallang (1993-1996), dan kemudian penulis melanjutakan pendidikan di SMA 1 Belopa pada tahun (1996-1999), dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas yang ada di Kota Makassar yaitu Universitas 45 Makassar di Fakultas Teknik Jurusan Planologi sampai pada Tahun 2004.